

Perubahan Rencana Strategis

DINAS KESEHATAN



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

TAHUN 2021 - 2023

Visi

Kota Kotamobagu Sebagai Kota Jasa dan
Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju
Masyarakat Sejahtera dan Berdaya saing

Misi

1. Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Modal Sosial Melalui Pemberdayaan Masyarakat.
2. Meningkatkan Daya Saing Daerah Secara Berkelanjutan Dengan Inovasi Dan Kreatifitas yang Berbasis Potensi Ekonomi Daerah Dan Berwawasan Lingkungan
3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang berbasis Kebutuhan Masyarakat Dengan Pendekatan Data Rill Didukung Teknologi Informasi Dan Tata kelola Yang Baik





Ir. Hj. TATONG BARA
WALIKOTA KOTAMOBAGU



NAYODO KOERNIAWAN, SH
WAKIL WALIKOTA KOTAMOBAGU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT hanya karena Ijin dan KuasaNya, sehingga penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinkes Kota Kotamobagu ini untuk masa waktu 3 (Tiga) tahun kedepan dapat terselesaikan.

Rencana Strategis Dinkes Kota Kotamobagu tahun 2021-2023 merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dimana masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas, dapat di handalkan dan terpercaya serta mudah dijangkau secara interaktif, untuk mencapai Visi-Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Mengingat besarnya manfaat dari dokumen ini, maka diharapkan dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas harus disertai dengan kerja keras dan kerja sama dari semua pihak, oleh sebab itu melalui kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan dan dukungan sepenuhnya baik langsung maupun tidak langsung atas tersusunnya rencana strategis ini. Semoga bermanfaat bagi kelanjutan pembangunan Kota Kotamobagu.

Kotamobagu, 7 Februari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN

KOTA KOTAMOBAGU



dr. TANTY KOROMPOT, MM.Kes

NIP. 19720102 200701 2 019

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Singkatan	iv
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penyusunan	5
Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu	25
2.3 Sarana dan Prasarana	28
2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu	30
2.5 Tantangan dan Peluang	34
Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	39
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kota Kotamobagu	39
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	50
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	57
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup	66
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	67
Bab IV Tujuan dan Sasaran	69
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan	71
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	73
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	117
Bab VIII Penutup	121

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Uraian Tugas dan Fungsi
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang
Tabel 2.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
Tabel 2.6	Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
Tabel 2.7	Prestasi Dinas Kesehatan
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun 2019-2020
Tabel 2.10	Tantangan dan Peluang
Tabel 2.11	Analisis SWOT
Tabel 3.1	Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Tabel 3.2	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Tabel 3.3	Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan
Tabel 3.4	Telaah Visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu
Tabel 3.5	Telaah Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu
Tabel 3.6	Telaahan Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota
Tabel 3.7	Telaahan Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kesehatan
Tabel 3.8	Telaahan Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pencapaian RENSTRA Kementerian Kesehatan
Tabel 3.9	Telaahan Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pencapaian RENSTRA Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Tabel 3.10	Telaahan Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pencapaian Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2021-2023
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2023

DAFTAR SINGKATAN

RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RENSTRA	Rencana Strategis
DINKES	Dinas Kesehatan
UPTD	Unit Pelaksana Teknis Dinas
DUK	Daftar Urutan Kepangkatan
PUSKESMAS	Pusat Kesehatan Masyarakat
RENJA	Rencana Kerja
OPD	Organisasi Perangkat Daerah

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RENSTRA adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap PD untuk jangka waktu lima tahun. RENSTRA disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RENSTRA Kementerian/Lembaga (K/L) dan RENSTRA Provinsi merupakan tolok ukur dalam pencapaian kinerja RENSTRA perangkat daerah. Jika capaian RENSTRA perangkat daerah melebihi sasaran RENSTRA Kementerian/Lembaga (K/L) dan RENSTRA provinsi maka hal ini memberikan indikasi bahwa kinerja perangkat daerah sudah baik secara Nasional/Provinsi. Sedangkan jika lebih rendah maka hal ini memberikan indikasi bahwa PD tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan seperti dalam perencanaan program, kegiatan dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pendanaan, prosedur mekanisme pelayanan dan strategi pelayanan yang ditempuh.

Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib di bidang Kesehatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinkes Kota Kotamobagu Tipe C.

Agenda Pembangunan Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu Tahun 2021–2023 yang dituangkan dalam Perubahan RENSTRA yang merupakan penjabaran dari RPJMD Perubahan Kota Kotamobagu Tahun 2021–2023 memuat substansi urusan bidang Kesehatan yang komprehensif, berkesinambungan dan merupakan perpaduan sinergis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta antar sektoral guna terwujudnya peningkatan akses dan mutu pelayanan Kesehatan serta menurunnya morbiditas sebagaimana yang dituangkan dalam penjelasan tentang kondisi umum, potensi dan permasalahan, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja (sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan) serta kerangka pendanaan.

Perubahan RENSTRA ini menjadi dasar penyusunan laporan akuntabilitas kinerja untuk diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan di masa depan.

Untuk itu penyusunan Perubahan RENSTRA Dinas Kesehatan sekurang-kurangnya memperhatikan dan mengacu pada perspektif keuangan, perspektif pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, perspektif pemberdayaan organisasi dan perspektif harapan pelanggan pengguna layanan Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu.

Dalam rangka mengantisipasi dan menjawab tantangan Visi dan Misi Kota Kotamobagu Tahun 2021-2023, maka Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu berupaya meningkatkan kinerja pelayanan administrasi perkantoran, meningkatkan akses dan mutu pelayanan serta menurunkan morbiditas.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan perubahan Renstra Dinkes Kota Kotamobagu antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005–2025;
16. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 133);
17. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu Tipe C.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RENSTRA Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu Tahun 2021-2023 adalah untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu dan kondisi yang diinginkan tiga tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Kota Kotamobagu Tahun 2021-2023.

Adapun tujuan penyusunan dari Perubahan RENSTRA Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu adalah:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
3. Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efesiensi serta memudahkan pelaksanaan evaluasi program yang sangat penting dalam rangka pengendalian program pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan RENSTRA Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu Tahun 2021-2023 berisikan hal-hal sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).
- 2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Kesehatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan berdasarkan sasaran/target RENSTRA Dinas Kesehatan tahun sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti *MDG's* atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap RENSTRA K/L dan RENSTRA Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan RENSTRA Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kesehatan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Kesehatan.

3.3. Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Propinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka

menengah RENSTRA K/L ataupun RENSTRA Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD.

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Dinas Kesehatan;
2. Sasaran jangka menengah pada RENSTRA K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari RENSTRA Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui RENSTRA Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- #### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Kotamobagu Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Uraian Tugas, dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kotamobagu; Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor Tahun tentang Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinkes Tipe C Kota Kotamobagu.

a. Tugas Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu.

1. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang diberikan kepala daerah/ dibidang kesehatan.
2. Melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah/Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Fungsi Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan
2. Memberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan
3. Mengadakan pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD) Puskesmas, laboratorium kesehatan lingkungan daerah, dan gudang farmasi dan perbekalan kesehatan.
4. Mengadakaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan dinas maupun dengan dinas/badan/bagian lain diluar dinas sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
5. Memberikan saran saran atau pertimbangan pertimbangan kepada walikota tentang langkah–langkah atau tindakan–tindakan yang perlu diambil dalam bidang kesehatan.
6. Penyusunan rencana dan program dibidang kesehatan berpedoman pada program nasional RPJMD provinsi dan Kota dan kebijakan pimpinan.
7. Melaksanakan pembinaan umum dan tehknis dalam pencapaian program dinas.

8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahunan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan penyusunan program tahun berikut ;
9. Melaksanakan rapat konsultasi dengan tiap bidang, sekretariat dan staf
10. Bimbingan dan pengawasan Urusan sekretariat dan rumah tangga dinas.
11. Melaksanakan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan ;
12. Melaksanakan tugas lain yang di berikan pimpinan.

c. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu

Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Merupakan pimpinan OPD dengan eselon II/a

2. Sekretaris

Merupakan pimpinan sekretariat dengan eselon III/a, yang membawahi para Kepala Sub Bagian dengan eselon IV/a, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian.

Merupakan pimpinan Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian dengan eselon III/b, yang membawahi Kepala Seksi dengan eselon IV/a yang terdiri dari :

- a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Masyarakat;
- b. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

4. Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan.

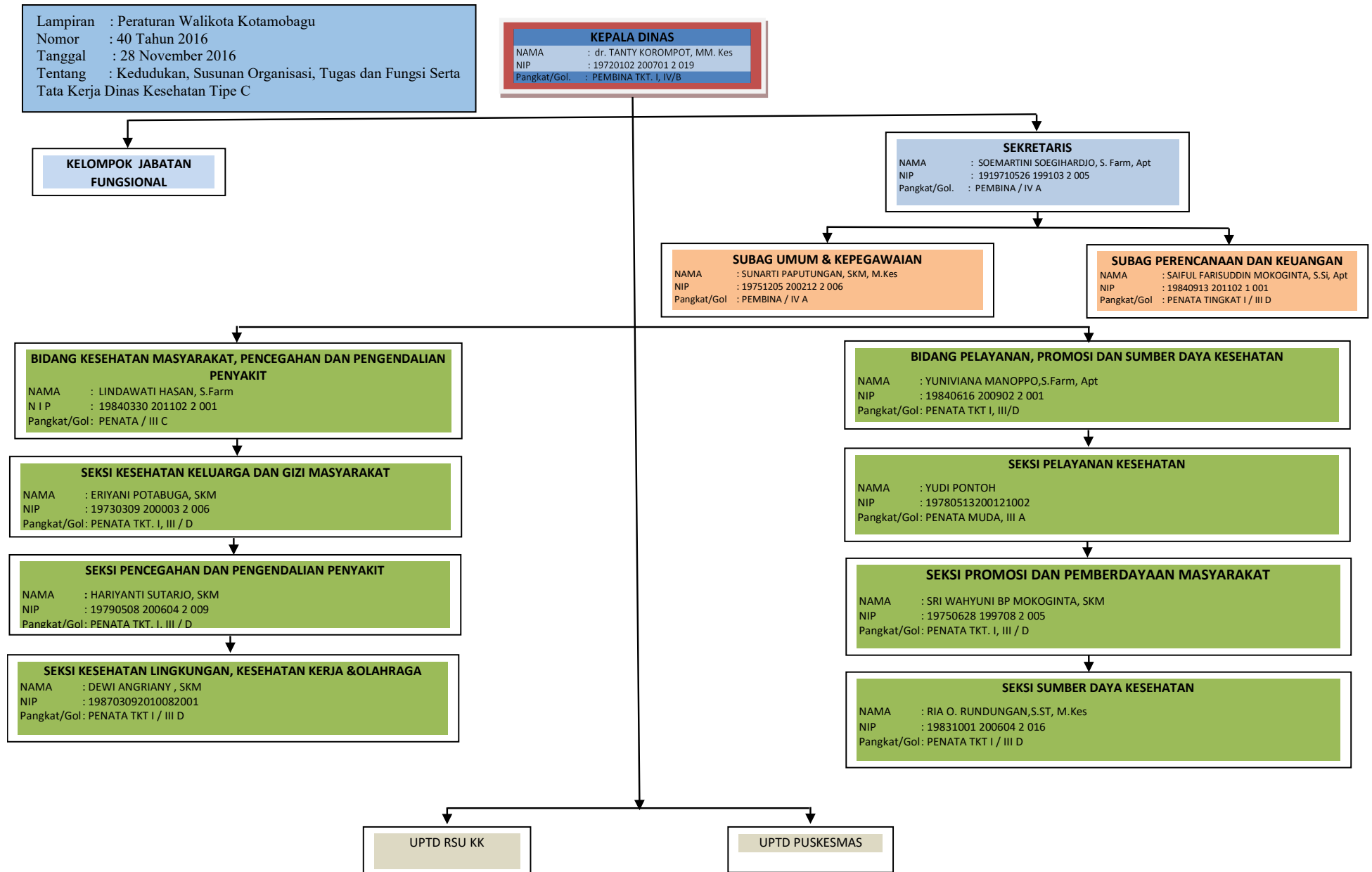
Merupakan pimpinan Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan dengan eselon III/b, yang membawahi Kepala Seksi dengan eselon IV/a yang terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Kesehatan
- b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
- c. Seksi Sumber Daya Kesehatan

5. Kelompok Jabatan Fungsional

d. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA KOTAMOBAGU



Berdasarkan struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu maka Tugas Pokok dan Fungsi dari masing – masing Jabatan adalah sebagai berikut :

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas kesehatan sebagaimana terlampir pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Uraian Tugas dan Fungsi

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
1	Kepala Dinas	Membantu Walikota untuk melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang diberikan kepada daerah di bidang kesehatan	a. Perumusan kebijakan di bidang Kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan Kesehatan, kefarmasian, alat Kesehatan dan PKRT serta sumber daya Kesehatan b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan Kesehatan, kefarmasian, alat Kesehatan dan PKRT serta sumber daya Kesehatan c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan Kesehatan, kefarmasian, alat Kesehatan dan PKRT

			serta sumber daya Kesehatan d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait bidang Kesehatan.
2	Sekretaris	Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, naskah dinas, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan.	a. Pengkoordinasian, sinergitas dan integritas pelayanan administrasi; b. Penyusunan perencanaan program, kegiatan dan melaksanakan pelaporan; c. Pelayanan urusan ketatausahaan dan keuangan; d. Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian; e. Penyelenggaraan urusan program dan pelaporan; f. Penyelenggaraan urusan umum dan rumah tangga g. Pelaporan pelaksanaan tugas, dan h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan rumah tangga	a. Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian umum dan kepegawaian; b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian; c. Menyiapkan bahan dan peralatan keperluan teknis dan administrasi ; d. Menata dan memelihara sarana dan prasarana; e. Menyiapkan bahan dan data kepegawaian; f. Melaksanakan panataan dan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian; g. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan; h. Melaksanakan urusan administrasi, pembinaan dan pengawasan kepegawaian i. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokolam dan perjalanan dinas;
---	-------------------------------	--	---

			j. Melaksanakan dan mengawasi urusan rumah tangga; k. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris/asset kantor baik yang bergerak maupun yg tidak bergerak; l. Melakukan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tatalaksana dan pengelolaan kesekretariatan; m. Melaksnakan monitoring evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.
	Kasubbag Perencanaan Dan Keuangan	menyiapkan dan menyusun perencanaan berdasarkan perencanaan dari bidang dan sub bidang dalam unit kerja, melakukan koordinasi,	a. menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian perencanaan dan keuangan; b. mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyusun rencana dan program satuan kerja;

		pengawasan dan evaluasi, melakukan urusan penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan, menyusun program dan kegiatan, serta melaksanakan pelaporan.	c. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing unit kerja; d. mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahunan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja; e. mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisis rumusan rencana belanja, anggaran / keuangan ; f. mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan/Anggaran; g. menyiapkan, menyusun dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan/anggaran;
--	--	--	--

			h. menyiapkan dan melaksanakan bahan/data, sistematika, prosedur dan mekanisme manajemen akuntansi pelaporan i. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi
	Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit	a. penyusunan rencana dan program kerja bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, surveillaas dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian

		tidak menular dan kesehatan jiwa.	penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi
--	--	-----------------------------------	--

			masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.
	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	melaksanakan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.	a. menyusun rencana dan program kerja seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; b. menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; c. melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;

			d. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi
	Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	mempunyai tugas melakukan pelayanan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga. pengembangan media	a. menyusun rencana dan program kerja seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; b. menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; c. melaksanakan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi; d. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan

			sesuai bidang tugas dan fungsi.
	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Melaksanakan program kerja seksi pencegahan dan pengendalian penyakit	a. menyusun rencana dan program kerja seksi pencegahan dan pengendalian penyakit; b. menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; c. melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi; d. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; e. melaksaaakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.
	Bidang Pelayanan, Promosi dan	melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional	a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang pelayanan, promosi dan sumber daya Kesehatan;

	Sumber Daya Kesehatan	di bidang pelayanan Kesehatan primer dan pelayanan Kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRP serta sumber daya manusia kesehatan	b. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan Kesehatan primer dan pelayanan Kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan Kesehatan tradisional, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kefarmasian, alat Kesehatan dan PKRP serta sumber daya Kesehatan; c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan Kesehatan primer dan pelayanan Kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan Kesehatan tradisional, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kefarmasian, alat Kesehatan dan PKRT serta sumber daya Kesehatan; d. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan
--	-----------------------	---	--

			Kesehatan primer dan pelayanan Kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan Kesehatan tradisonal, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kefarmasian, alat Kesehatan dan PKRT serta sumber daya Kesehatan; dan e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan Kesehatan primer dan pelayanan Kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan Kesehatan tradisonal, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kefarmasian, alat Kesehatan dan PKRT serta sumber daya Kesehatan;
	Seksi Pelayanan Kesehatan	Melaksanakan Program Kerja Pelayanan Kesehatan	a. Menyusun rencana dan program kerja seksi pelayanan Kesehatan b. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar,

			pedoman, kriteria di bidang pelayanan Kesehatan; c. Melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervise; d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasilitas layanan Kesehatan di bidang pelayanan Kesehatan primer dan pelayanan Kesehatan rujukan serta pelayanan Kesehatan tradisional dan; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.
	Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat		a. Menyusun rencana dan program kerja seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat; b. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat;

			c. Melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervise; d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat dan; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.
	Seksi Sumber Daya Kesehatan		a. Menyusun rencana dan program kerja seksi sumber daya Kesehatan b. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang sumber daya Kesehatan; c. Melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervise; d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pemantauan evaluasi dan pelaporan kefarmasian, alat Kesehatan dan PKRT

			dan sumber daya Kesehatan manusia dan; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.
--	--	--	---

Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 133);
3. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Tipe C.

2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu.

Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan mempunyai peran penting pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan tugas dan fungsi dari organisasi SKPD Dinkes Kotamobagu. Pembangunan Kesehatan di Kotamobagu memerlukan berbagai jenis tenaga kesehatan yang bergerak bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Tenaga kesehatan tersebut harus dapat memahami prinsip paradigma sehat yang mengutamakan upaya peningkatan, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan dilakukan melalui pendidikan dan pengembangan tenaga kesehatan, serta pelatihan tenaga yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta dan masyarakat.

Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri dari Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan. Pola tenaga kesehatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a) Tenaga Medis (meliputi Dokter dan Dokter Gigi).
- b) Tenaga Keperawatan (meliputi Perawat, Perawat Gigi dan Bidan).
- c) Tenaga Kefarmasian (meliputi Apoteker, Analis Farmasi dan Asisten Apoteker).
- d) Tenaga Kesehatan Masyarakat (meliputi Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Mikrobiolog Kesehatan, Penyuluh Kesehatan, Administrator

Upaya keberhasilan dalam meningkatkan kinerja dinas memunculkan konsekuensi diperlukannya sumber daya manusia (SDM) aparatur yang memiliki kompetensi khususnya di bidangnya masing masing., diperlukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) .

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu berserta jaringannya (UPTD RSUD, Puskesmas dan Instalasi Farmasi didukung oleh 600 orang personil dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jml (org)	
1	Laki-laki	102	Org
2	Perempuan	498	Org
	Jumlah	600	Org

Sumber :Subag Umum dan Kepegawaian Dinkes Tahun 2021

Golongan ruang mempunyai keterkaitan dengan karier pegawai, dimana karier pegawai dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan data yang ada, golongan ruang pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu dan Jaringannya terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

No	Gol Ruang	Jml (org)	
1	IV/c	3	Org
2	IV/ b	12	Org
3	IV/ a	47	Org
4	III/d	108	Org
5	III/c	116	Org
6	III/b	95	Org
7	III/a	88	Org
8	II/d	25	Org
9	II/c	105	Org
10	II/b	0	Org
11	II/a	1	Org
	Jumlah	600	Org

Sumber :Subag Umum dan Kepegawaian Dinkes Tahun 2021

Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi serta mutu pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan pemerintah baik itu di Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas dan IFK karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal

No	Tingkat Pendidikan	Jml (org)	
1	S2	13	Org
2	S1	263	Org
3	Diploma	315	Org
4	SLTA	9	Org
	Jumlah	600	Org

Sumber :Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Tahun 2021

Di Lingkup Dinas Kesehatan dan Jaringannya dalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu unit organisasi dibedakan antara pemegang jabatan

struktural, pemegang jabatan non struktural , ke 2 pemegang jabatan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting di dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi. Untuk melihat jumlah pemegang jabatan baik struktural maupun pemegang jabatan non struktural pada Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel 2.5.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Tingkat Pendidikan	Jml (org)	
1	Struktural	12	Org
	a. Eselon II.b	1	Org
	b. Eselon III.a	1	Org
	c. Eselon III.b	5	Org
	d. Eselon IV.a	17	Org
	e. Eselon IV b	1	Org
2	Non Struktural (JFU dan JFT)	-	Org
	a. Jabatan Fungsional Umum	39	Org
	b. Jabatan Fungsional Tertentu	524	Org
	Jumlah	600	Org

Sumber :Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Tahun 2021

2.3 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pada Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Sarana Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kndisi			Ket.
			B	RR	RB	
1	Bangunan gedung	4	√			
2	Kendaraan dinas					
	- roda 4	4 Unit	√			
	- roda 2	20 Unit	√			
3	Portable Generating Set	2 Unit	√			
4	Scanner	2 Unit	√		√	
5	AC	21 Unit	√		√	
6	Mesin Ketik Manual	0 Unit	√			

	Standar (14-16)					
7	Mesin Ketik Elektronik	2 Unit	√			
8	Mesin Absen (Time Recorder)	2 Unit	√			1 unit baik dan 1 unit rusak
9	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	0 Unit				
10	Lemari Besi	14 Unit	√			
11	Rak Kayu	6 buah	√			
12	Filling Besi/Metal	1 buah	√			
13	Band Kas	0 Unit				
14	Lemari Makan	0 Unit				
15	Lemari kayu	11 Unit	√			8 unit Baik dan 3 unit Rusak
16	Alat Penghancur Kertas	0 Unit	√			
17	Papan Nama Instansi	1 Unit	√			
18	White Board	4 Buah	√			
19	Meja Rapat	1 Unit	√			
20	Meja Reseption	1 Unit	√			
21	Kursi Rapat	8 Buah	√			
22	Kursi Tamu	60 Buah	√			
23	Meja Biro	22 Buah	√			
24	Sofa	4 Unit	√			
25	Jam Elektronik	1 Buah	√			
26	Mesin Penghisap Debu	0 Unit	√			
27	Lemari Es	4 Unit	√			
28	Televisi	2 Unit	√			
29	Wireless	1 Unit	√			
30	Mini Komputer / Laptop / Notebook	12 Unit	√		√	5 Unit Baik, 7 Unit Rusak Berat
31	P.C Unit	12 Unit	√		√	10 unit Baik dan 2 Unit Rusak
32	Printer	21 Unit	√		√	15 Unit Baik, 6 Unit Rusak Berat
33	Server	0 Unit	√			
34	Router	5 Unit	√			
35	Meja Kerja	31 Unit	√		√	26 Unit Baik, 5 Unit Rusak Berat
36	Kursi Kerja	69 Unit	√			
37	Lemari Arsip	0 Unit	√			
38	Buffet Kayu	0 Unit	√			

39	Proyektor + Attachment	3 Unit	√		√	2 Unit Baik, 1 Unit Rusak Berat
40	Unintemuptible Power Supply (UPS)	2 Unit			√	

Sumber :Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Tahun 2021

2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu Tahun 2019 - 2020

Kinerja pelayanan adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang/organisasi dalam rangka pelayanan terhadap kelompok sasaran suatu program/kegiatan. Adapun kelompok sasaran Dinas Kesehatan Kota Kota Kotamobagu adalah seluruh Masyarakat dan *stakeholder* yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.

Adapun capaian prestasi Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu Tahun 2019 s.d. Tahun 2021 baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Prestasi Dinas Kesehatan

No	Tahun	Jenis Penghargaan/ Prestasi
1	2019	KEMENKES RI - Penghargaan Kabupaten Kota Sehat Tahun 2019 Kategori WIWERDA
2	2019	KEMENKES RI – Pelaksana Terbaik Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019
3	2020	KEMENKES RI – Penghargaan STBM Awards Kepada Kota Kotamobagu Tahun 2020

Selanjutnya capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu untuk Tahun 2019-2020 dapat dilihat pada capaian indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Kesehatan sebagai berikut :

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan

No	Indikator Kinerja sesuai Tupoksi BKPP	Satuan	Target IKK	Target RENSTRA OPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke -		Rasio Capaian pada Tahun ke -	
				2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	%		80	80	65.04	76.86	81	96
2	Persentase Apotik dan IRTP yang di awasi	per 100.000 penduduk		0	85	70.00	90.32	100	106
3	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%		100	100	100.00	100.00	100	100
4	Cakupan prevalensi gizi kurang	%		2.12	2.06	1.50	0.59	129	171
5	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%		100	100	100.00	100.00	100	100
6	Cakupan prevalensi gizi buruk	%		0.50	0.50	0.05	0.03	190	194
7	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	per 1.000 balita		85	88	82.00	47.32	96	54
8	Penderita diare yang ditangani	%		83	83	57.54	32.51	69	39
9	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%		95	95	70.76	52.72	74	55
10	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	per 1.000 penduduk		0.020	0.02	0.08	0.09	-200	-250
11	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%		1.6	1.6	1.56	4.86	103	-104
12	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	per 1.000 penduduk		100	100	100	100	100	100
13	Angka kejadian Malaria	per 1.000 penduduk		0.80	0.80	0	4.05		
1414	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%		2.40	2.40	1.37	0.57	57	24
15	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	per 1.000 penduduk		90	91	60.6	69.7	67	77
16	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%		100	100	0.35	6.25	0	6
17	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%		86	87	97.71	47.32	114	54
18	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	5		100	100	100.00	0.00	100	0

19	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Terhadap Kesehatan Haji	'%		100	100	100.00	100.00	100	100
20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk		350	361	266.00	200.00	124	145
21	Cakupan Penemuan Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular Umur 15 s/d 59 Tahun	'%		40	45	31.94	51.85	80	115
22	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	'%		90	90	93.61	93.38	104	104
23	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	'%		9.49	9.49	36.96	5.11	389	54
24	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	'%		56.92	56.92	31.95	68.82	56	121
25	Rasio posyandu per satuan balita	per 1.000 balita		4.02	4.11	6.44	6.44	160	157
26	Cakupan puskesmas	'%		100	100	125.00	125.00	125	125
27	Cakupan jumlah organisasi UKBM	'%		100	100	100.00	100.00	100	100
28	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	per 1.000 penduduk		11.80	11.80	0.12	0.12	1	1
29	Cakupan pembantu puskesmas	'%		33	33	21.21	21.21	64	64
30	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	per 1.000 penduduk		3.16	3.16	4.55	0.03	144	1
31	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	per 1.000 penduduk		153	166	153.00	2.63	100	2
32	Cakupan Tenaga Kesehatan yang terqualifikasi sesuai standar	'%		88	90	89.00	58.94	101	65
33	Rasio dokter per satuan penduduk	per 1.000 penduduk		30	31	30	0.36	100	1
34	Cakupan persentase lansia yang mendapat pelayanan kesehatan	'%		0.00	22.00	16.06	103.82	100	472
35	Cakupan Ketersediaan Profil kesehatan	'%		100	100	100.00	100	100	100
36	Cakupan implementasi sistem informasi kesehatan daerah	'%		20	40	40	40	200	100
37	Cakupan ketersediaan sarana prasarana bidang kesehatan	'%		90	95	90.00	60.00	100	63
38	Cakupan peserta BPJS KIS JKN	'%		90	95	50.33	95.39	56	100
39	Angka kelangsungan hidup bayi	1000 KH		976	980	0.99	-0.81	0	0
40	Angka Kematian Neonatal per 1000 KH	Bayi		24	20	6.40	1.81	173	191
41	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH	Orang		24	20	7.50	1.81	169	191
42	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	'%		85	87	115.00	100.00	135	115
43	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan	'%		100	100	100.00	0.00	100	0

	setingkat								
44	Cakupan pelayanan anak balita	'%		85	87	58.00	93.03	68	107
45	Angka Kematian Balita per 1000 KH	Orang		10.0	10.0	8.70	3.02	113	170
46	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	'%		90	91	75.70	93.05	84	102
47	Cakupan pelayanan nifas	'%		85	90	70.20	91.17	83	101
48	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	'%		80	90	119.00	100.00	149	111
49	Cakupan kunjungan bayi	'%		90	91	90.00	91.07	100	100
50	Angka kematian Ibu per 100.000 KH	100.000 KH		167	167	231.00	301.39	62	20
51	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	'%		85	90	72.50	81.91	85	91
52	Cakupan persentase pemukiman dan lingkungannya yang memenuhi standar kesehatan lingkungan	'%		86	87	86.00	52.34	100	60
53	Persentase Pendapatan Rumah sakit dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan	'%		0	100	75.97	75.97	#DIV/0!	76
54	Persentase Pemenuhan Gizi Pasien	'%		100	100	100.00	100.00	100	100
55	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	'%		11.11	14.81	11.32	80.06	102	541
56	persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dalam kondisi baik	'%		21.51	19.35	65.42	77.61	304	401
57	Persentase Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional	'%		100	100	100.00	100.00	100	100
58	Persentase Pemenuhan tenaga kesehatan yang sesuai standar tipe Rumah sakit	'%		26.57	19.04	60.85	49.52	229	260
59	Tingkat pelayanan obat dan perbekalan serta menjamin mutu obat dan perbekalan terhadap Masyarakat	'%		85	85	85.00	0.00	100	0

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Tahun 2019 –2020

Uraian	Anggaran Tahun ke-		Realisasi Anggaran Tahun ke -		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	
	1	2	1	2	1	2
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	7	8	9	10
Belanja Langsung	34.277.153.999	37.271.480.814	29.689.914.651	33.985.907.051	86.62	99.58

Berdasarkan tabel diatas hasil evaluasi pada tahun pertama (2019) anggaran Belanja Langsung Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu sebesar Rp. 34,277.153.999 dan realisasi sebesar Rp. 29.689.914.651 atau rasio capaian sebesar 86,62%, pada tahun kedua (2020) anggaran Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu sebesar Rp.37.271.480.814 dan realisasi sebesar Rp. 33.985.907.051 atau rasio capaian sebesar 99,58%.

2.5 Tantangan Dan Peluang

Tabel 2.10
Tantangan dan Peluang

NO	Tantangan	Peluang
1	Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan yang belum memadai merupakan kelemahan yang dapat memengaruhi keberhasilan pembangunan kesehatan.	Adanya regulasi bidang kesehatan yang membuka peluang untuk melaksanakan pembangunan kesehatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah sehingga lebih berhasil guna dan berdaya guna.
2	Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang belum memadai mengakibatkan akses yang belum menjangkau seluruh masyarakat dan mutu pelayanan kesehatan yang belum maksimal.	Penggunaan sarana pelayanan kesehatan oleh masyarakat sudah cukup baik dan hal ini menjadi peluang untuk peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pengembangan pemberdayaan masyarakat.
3	Penerapan <i>Standard Operational Procedur</i> (SOP) belum optimal mengakibatkan rendahnya mutu pelayanan kesehatan. Kemampuan aparatur dalam menjalankan standar	a) Mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan tenaga kesehatan

	operasional prosedur pelayanan kesehatan ditinjau dari aspek mutu masih perlu ditingkatkan.	b) Adanya Pelaksanaan program pokok yang sesuai dengan
4	Sistem informasi komunikasi yang belum optimal menjadi faktor yang menghambat dalam penyebarluasan informasi kesehatan dan peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat
5	Kesadaran dan Partisipasi masyarakat dan Lembaga swasta dalam penanggulangan masalah Kesehatan relatif rendah	
6	Perilaku Hidup bersih dan sehat belum menjadi budaya masyarakat kota kotamobagu	
7	Pandemi COVID belum memadainya ruang isolasi saat terjadi peningkatan kasus dan terbatasnya alat PCR	

2.5.1. Analisa SWOT

1. Strength (S)

- a. Adanya Undang-undang dan peraturan tentang Kesehatan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kesehatan.
- b. Tersedianya aparatur dan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi pendidikan dan komitmen kinerja yang baik.
- c. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan.
- d. Kemampuan personil dalam struktur organisasi yang relevan dan professional.

2. Weakness (W)

- a. Prasarana yang kurang memadai untuk memberikan kenyamanan pelayanan kepada Masyarakat yang berkunjung ke Fasilitas kesehatan.

- b. Terbatasnya personil tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Primer dan Rujukan.
 - c. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan kesehatan.
 - d. Mutasi ASN yang sudah dilatih sehingga menghambat pelaksanaan program/pelayanan di fasilitas kesehatan
3. Opportunity (O)
- a. Adanya potensi sumber daya manusia aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personil di fasilitas kesehatan.
 - b. Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar disiplin dan professional.
 - c. Adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan dan mengelola PNS/ASN yang professional dalam penataan manajemen PNS/ASN.
 - d. Sistem teknologi informasi dan komputerisasi yang mendukung pelayanan yang prima, cepat dan tepat di Fasilitas Kesehatan
 - e. Tersedianya Fasilitas Laboratorium di Puskesmas dan RS
 - f. Tersedianya sumber dana yang menunjang kegiatan program pelayanan Kesehatan (DAU dan DAK)
4. Thread (T)
- a. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik dari masyarakat dalam proses penanggulangan penyakit dan pelayanan Kesehatan.
 - b. Era globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menuntut perkembangan sistem pelayanan kesehatan harus mengikuti perubahan.

Tabel 2.11
Analisis SWOT

internal/eksternal	Strength	Weakness
	• Adanya Undang-undang dan peraturan tentang Kesehatan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang	a. Prasarana yang kurang memadai untuk memberikan kenyamanan pelayanan kepada Masyarakat yang berkunjung ke Fasilitas kesehatan.

	kesehatan. • Tersedianya aparatur dan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi pendidikan dan komitmen kinerja yang baik. • Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan. • Kemampuan personil dalam struktur organisasi yang relevan dan professional.	b. Terbatasnya personil tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Primer dan Rujukan. c. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan kesehatan. d. Mutasi ASN yang sudah dilatih sehingga menghambat pelaksanaan program/pelayanan di fasilitas kesehatan
Opportunities	SO	WO
• Adanya potensi sumber daya manusia aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personil di fasilitas kesehatan. • Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar disiplin dan professional. • Adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan dan mengelola PNS/ASN yang professional dalam penataan manajemen PNS/ASN. • Sistem teknologi informasi dan	• Mendayagunakan Undang-undang dan peraturan tentang kesehatan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kesehatan untuk menata potensi sumber daya manusia Kesehatan.	Meningkatkan penyampaian informasi kesehatan melalui teknologi informasi kepada masyarakat pengguna layanan kesehatan

komputerisasi yang mendukung pelayanan yang prima, cepat dan tepat di Fasilitas Kesehatan • Tersedianya Fasilitas Laboratorium di Puskesmas dan RS • Tersedianya sumber dana yang menunjang kegiatan program pelayanan Kesehatan (DAU dan DAK)		
Thread	ST	WT
• Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik dari masyarakat dalam proses penanggulangan penyakit dan pelayanan Kesehatan. • Era globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menuntut perkembangan sistem pelayanan kesehatan harus mengikuti perubahan.	Memanfaatkan kemampuan personil dalam struktur organisasi yang relevan dan professional untuk menghadapi tuntutan standar pelayanan publik bagi masyarakat penerima layanan secara profesional	Dengan terbatasnya personil yang menangani pelayanan Kesehatan bagi masyarakat yang mendapatkan pelayanan, ditingkatkan dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung perkembangan dan penyampaian informasi kesehatan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA KOTAMOBAGU

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu.

Beberapa faktor permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu sebagai berikut:

Tabel 3.1
Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jabatan Tugas dan Fungsi	Permasalahan
Jabatan Kepala Dinas Tugas: Membantu Walikota untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang Kesehatan.. Fungsi: a. Perumusan kebijakan di bidang Kesehatan masyarakat pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan; d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.	Tidak ada permasalahan
Jabatan Sekretaris Tugas: Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, naskah dinas, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan.	Tidak ada Permasalahan

Jabatan Tugas dan Fungsi	Permasalahan
Fungsi: a. Pengkoordinasian, sinergitas dan integritas pelayanan administrasi; b. Penyusunan perencanaan program, kegiatan dan melaksanakan pelaporan; c. Pelayanan urusan ketatausahaan dan keuangan; d. Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian; e. Penyelenggaraan urusan program dan pelaporan; f. penyelenggaraan urusan umum dan rumah tangga; g. pelaporan pelaksanaan tugas; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.	
Jabatan: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tugas: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan rumah tangga. Fungsi; a. Menyusun rencana dan program kegiatan untuk sub bagian umum dan kepegawaian; b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian; c. Menyiapkan bahan dan peralatan keperluan teknis dan administrasi; d. Menata dan memelihara sarana dan prasarana; e. Menyiapkan bahan dan data kepegawaian; f. Melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian; g. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan; h. Melaksanakan urusan administrasi, pembinaan dan pengawasan kepegawaian; i. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas; j. Melaksanakan dan mengawasi urusan rumah tangga; k. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris/aset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak; l. Melakukan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tata laksana dan pengelolaan kesekretariatan; m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan	1) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang;

Jabatan Tugas dan Fungsi	Permasalahan
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.	
Jabatan: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Fungsi: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun perencanaan berdasarkan perencanaan dari bidang dan sub bidang dalam unit kerja, melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi, melakukan urusan penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan, menyusun program dan kegiatan, serta melaksanakan pelaporan. Tugas: - Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian perencanaan dan keuangan; - Mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyusun rencana dan program satuan kerja; - Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing unit kerja; - Mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahunan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja; - Mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisis rumusan rencana belanja, anggaran / keuangan; - Mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan /Anggaran; - Menyiapkan, menyusun dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan/anggaran; - Menyiapkan dan melaksanakan bahan/data, sistematika, prosedur dan mekanisme manajemen akuntansi pelaporan; - Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas; - Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan - Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.	
Jabatan: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Tugas:	1. Belum Optimalnya Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan; 2. Belum terpenuhinya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang

Jabatan Tugas dan Fungsi	Permasalahan
Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyalit tidak menular dan kesehatan jiwa Fungsi: - Penyusunan rencana dan program kerja bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit - Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; - Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; - Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; - Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan - Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinal sesuai bidang tugas dan fungsi.	berkompeten; - Sarana Prasarana Penunjang pelaksanaan pelayanan UKM dan UKP yang belum Memadai. - Tingginya Masalah Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat - Tingginya kasus Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Penyakit berbasis Lingkungan
Jabatan: Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Tugas: Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan Keluarga dan Gizi. Fungsi: Menyusun rencana dan program kerja seksi kesehatan keluarga dan gizi	- Tingginya angka kematian ibu dan Bayi - Adanya Masalah Gizi kurang dan Gizi Buruk - Pemantauan Perkembangan/ Pertumbuhan Balita yang belum Optimal - Meningkatnya Prevalensi Stunting

Jabatan Tugas dan Fungsi	Permasalahan
masyarakat; b. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; c. Melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; dan e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi	
Jabatan: Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Tugas: Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas melakukan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga. Fungsi: a. Menyusun rencana dan program kerja seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; b. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; c. Melaksanakan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi; d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.	1. Sarana dan Prasarana Penunjang pelayanan Kesehatan Lingkungan yang masih kurang 2. Pemantauan dan Pembinaan kesehatan kerja dan olahraga yang belum Optimal
Jabatan: Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tugas: Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Fungsi: a. Menyusun rencana dan program kerja seksi pencegahan dan pengendalian penyakit; b. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; c. Melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi; d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan	1. Tingginya kasus Penyakit Tidak menular (Hipertensi). 2. Masih tingginya kasus Penyakit menular (TB) 3. Sistem Pencatatan dan Pelaporan yang belum efektif. 4. Sistem Informasi Kesehatan yang belum terintegrasi

Jabatan Tugas dan Fungsi	Permasalahan
pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.	
Jabatan: Kepala Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber daya kesehatan Tugas: Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan Fungsi: - Penyusunan rencana dan program kerja bidang pelayanan, promosi dan sumber daya kesehatan; - Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; - Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; - Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, promosi dan pemberdayaan masyarakat kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; dan - Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta Sumber	1. Belum terintegrasinya Sistem Informasi Kesehatan Daerah 2. Belum maksimalnya pelaksanaan Sistem Rujukan 3. Akses dan Mutu Pelayanan Jejaring Puskesmas yang belum memadai 4. Menurunnya Kuota Kepesertaan PBI sehingga tidak tercapainya program UHC 5. Pelayanan promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat belum optimal

Jabatan Tugas dan Fungsi	Permasalahan
daya manusia kesehatan.	
Jabatan: Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tugas : Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan upaya Pelayanan Kesehatan Fungsi: - Menyusun rencana dan program kerja seksi pelayanan kesehatan; - Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang pelayanan kesehatan; - Melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi; - Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasilitas layanan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan, serta pelayanan kesehatan tradisional; dan - Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.	Mutu Fasilitas Layanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang belum sesuai Standar
Jabatan: Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Tugas: Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas Pelayanan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Fungsi: - Menyusun rencana dan program kerja seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat; - Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat; - Melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi; - Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat; dan - Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.	Belum maksimalnya pelaksanaan program Gerakan Masyarakat (Germas)

Jabatan Tugas dan Fungsi	Permasalahan
Jabatan: Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan Tugas : Seksi Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas Pelayanan Sumber Daya Kesehatan Fungsi: a. Menyusun rencana dan program kerja seksi sumber daya kesehatan; b. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang sumber daya kesehatan; c. Melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi; d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT dan sumber daya manusia kesehatan; dan e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.	1. Pengawasan obat, makanan dan bahan tambahan berbahaya belum maksimal 2. Belum terpenuhinya SDM yang berkompeten.

Dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan yang merupakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu menghadapi beberapa kendala/permasalahan. Adapun permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Derajat Kesehatan Masyarakat belum optimal	Mutu pelayanan kesehatan yang belum optimal	cakupan program yang belum capai target
			Mutu pelayanan di puskesmas belum sesuai dengan standar Akreditasi
			Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan
		Pelayanan promosi Kesehatan dan pemberdayaan	Tersedianya media promosi kesehatan yang belum menjangkau seluruh

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		masyarakat belum optimal	desa/kelurahan dan sekolah
			Mutu petugas penunjang kesehatan yang masih kurang
		Pengawasan obat, makanan dan bahan tambahan berbahaya belum maksimal	Adanya kasus penyalahgunaan obat dan bahan tambahan berbahaya pada makanan
			Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi obat dan makanan yang aman bagi kesehatan
			Kurangnya pelatihan tenaga teknis sesuai tupoksi
		Tingginya kasus Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Penyakit berbasis Lingkungan	Kurangnya tenaga yang sesuai kompetensi
			Adanya Mutasi Petugas Program yang tanpa Konfirmasi SKPD
			Tidak adanya anggaran untuk pelatihan kompetensi petugas program
			Ketidakpatuhan pasien dalam minum obat
			Masih adanya pasien yang mangkir
			Pola makan dan Gaya hidup masyarakat yang tidak Sehat
			Masih adanya stigma di masyarakat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Tingginya masalah kesehatan keluarga dan Gizi Masyarakat	Tingginya Kasus penyakit Degeneratif (PTM)
			Cakupan ANC masih rendah
			Status Kesehatan Ibu yg rendah
			Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang masih rendah
			Rendahnya kunjungan Neonatal di Faskes
			Rendahnya kunjungan ibu Nifas
			Kapasitas Petugas/kompetensi yang tidak merata
			Masih adanya ibu hamil yang Anemia
			Rendahnya pemanfaatan Tablet Fe bagi Remaja Putri dan Ibu Hamil
			Intake zat gizi yang tidak memadai
			Penyakit Infeksi
			Pemantauan perkembangan/pertumbuhan balita yg tdk berjalan optimal

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Tabel. 3.3 Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan

Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Mutu Pelayanan Kesehatan di Fasilitas kesehatan dasar dan Rujukan belum memadai	1. Masih ada Puskesmas yang terakreditasi Dasar dan madya 2. Status Akreditasi RS rujukan belum ada yang	1. Pelaksanaan Akreditasi diatur dalam Permenkes 43/2019 2. Pelaksanaan Akreditasi diatur dalam

Permasalahan	Faktor Penghambat Utama	Faktor Pendorong
	3. Kapasitas teknis SDM belum maksimal 4. ASN yang rangkap jabatan/tugas	Permenkes no.12 tahun 2020 3. Jenis profesi dan tingkat pendidikan tenaga kesehatan yang memadai 4. adanya SOP dan uraian tupoksi yang jelas.
Upaya Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat belum optimal	1. Keterbatasan jumlah Media Promosi Kesehatan tidak dapat menjangkau di seluruh desa/kelurahan dan Sekolah 2. Kapasitas teknis SDM belum maksimal	1. Tersedianya referensi media promosi berupa : leaflet, poster, brosur, materi penyuluhan kesehatan 2. Adanya jenis profesi dan tingkat pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
Pengawasan Obat, Makanan dan Bahan Tambahan Berbahaya belum maksimal	1. Sarana dan prasarana penunjang pengawasan yang belum memadai 2. Kapasitas teknis SDM belum maksimal 3. Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat masih rendah	1. Adanya prasarana pemeriksaan bahan tambahan makanan berbahaya 2. Jenis profesi dan tingkat pendidikan tenaga kesehatan memenuhi kriteria 3. Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan serta bahan tambahan makanan yang berbahaya diatur dalam Instruksi Walikota Kotamobagu no. 1 tahun 2017
Tingginya kasus Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Penyakit berbasis Lingkungan	1. Keitidakpatuhan pasien dalam minum obat 2. Pola makan dan Gaya hidup masyarakat yang tidak sehat	1. Ketersediaan Obat yang cukup 2. Program Pemerintah melalui Gerakan Masyarakat Hidup

Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	3. Masih tingginya temuan kasus TB	Sehat (GERMAS) yaitu : 1. Melakukan aktivitas fisik 30 menit perhari, 2. Mengonsumsi buah dan sayur, 3. Memeriksa kesehatan secara rutin 3. Deklarasi stop BABS dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat kabupaten/kota
Tingginya masalah kesehatan keluarga dan Gizi Masyarakat	1. Cakupan ANC masih rendah 2. Pemantauan perkembangan/pertumbuhan balita yg tdk berjalan optimal	1. Akses ke Pelayanan Kesehatan yang mudah terjangkau 2. tersedianya Sarana dan Prasarana kesehatan yang memadai

Terhadap isu-isu permasalahan pelayanan kesehatan diatas maka diperlukan pemahaman yang komprehensif serta sinergitas atas beberapa target kinerja yang ditetapkan dalam beberapa ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

- Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan
- Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Kesehatan
- Sustainable Development Goal's (SDG's)
- Indikator Kesehatan Nasional dalam Renstra Kementerian Kesehatan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu terpilih periode Tahun 2018–2023 adalah **“Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing”**. Dengan 3 (tiga) misi untuk mendukung pencapaian visi tersebut, yaitu :

- Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat berbasis modal sosial

- melalui pemberdayaan masyarakat;
- Meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreatifitas yang berbasis potensi ekonomi daerah dan berwawasan lingkungan;
 - Meningkatkan Pelayanan Publik yang berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data riil, didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik.

Adapun rumusan misi pembangunan Kota Kotamobagu untuk 5 tahun kedepan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu adalah Misi ke-1 yaitu **“Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat berbasis modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat”**.

Tabel 3.4

Telaah Visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu

VISI	TUGAS POKOK DAN FUNGSI PD	HASIL TELAHAH
“Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing”	Membantu Walikota untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang Kesehatan. Fungsi: 1. Perumusan kebijakan di bidang Kesehatan masyarakat pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan masyarakat,	• Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, • Mengembangkan kompetensi sumber daya kesehatan • Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.

VISI	TUGAS POKOK DAN FUNGSI PD	HASIL TELAAH
	pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan; d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.	

Tabel 3.5**Telaah Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu**

MISI	TUGAS POKOK DAN FUNGSI	HASIL TELAAH
Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Modal Sosial Melalui Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Fungsi: a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit b. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan	Dalam mewujudkan misi 3 Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 1. Pengadaan Alat Penunjang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. 2. Pemberian Rekomendasi Jaminan Persalinan. 3. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Sarana Air Minum dan Tempat Pengolahan Makanan; 4. Melaksanakan Pembinaan Kesehatan kerja; 5. Melaksanakan kegiatan Aktifitas Fisik dan Pembinaan Kesehatan Olahraga. 6. Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan TPM untuk rekomendasi penerbitan Sertifikat Laik Higiene. 7. Melakukan pengukuran

MISI	TUGAS POKOK DAN FUNGSI	HASIL TELAAH
	kerja dan olah raga, surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; d. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinal sesuai bidang tugas dan fungsi.	Kebugaran jasmani. 8. Melakukan kegiatan Surveilans dan Imunisasi 9. Melakukan skrining PTM 10. Melakukan Pendampingan penderita ODGJ.

MISI	TUGAS POKOK DAN FUNGSI	HASIL TELAAH
	Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan Tugas: Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan Fungsi: - Penyusunan rencana dan program kerja bidang pelayanan, promosi dan sumber daya kesehatan; - Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; - Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT	Dalam mewujudkan misi 3 Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan. - Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan. - Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian - Pengawasan IRTP - Pendampingan kegiatan pemberdayaan masyarakat. - Pembudayaan kegiatan gerakan Masyarakat Hidup sehat - Peningkatan Promosi Kesehatan - Melakukan Pembinaan UKBM - Mengeluarkan Rekomendasi JKN - Melaksanakan Pembinaan dan Monev Akreditasi Rumah Sakit, Puskesmas dan Jejaring pelayanan Kesehatan. - Melaksanakan Pengawasan kegiatan Sistem Rujukan di RS dan Puskesmas. - Melakukan Pembinaan dan Pengawasan tempat Penyehat Tradisional. - Melaksanakan Pembinaan Program

MISI	TUGAS POKOK DAN FUNGSI	HASIL TELAAH
	serta sumber daya manusia kesehatan; d. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, promosi dan pemberdayaan masyarakat kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; dan e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta Sumber daya manusia kesehatan.	Indonesia sehat.

Tabel 3.6
Telaahan Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
Pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota

Visi		Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing		
No	Misi Walikota dan Wakil Walikota			
	Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Modal Sosial Melalui Pemberdayaan Masyarakat			
	Tujuan : Terwujudnya Pembangunan Manusia yang sejahtera	Sasaran : Meningkatnya kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat	Arah Kebijakan sasaran 1 : 1. Meningkatkan kualitas dan proses pelayanan kesehatan dasar dan penyelesaian penyebaran Covid-19. 2. Melanjutkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan Covid-19 3. Mempertahankan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan Covid-19	
	Penunjang Urusan : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Angka Kematian Ibu	Tingginya angka kematian Ibu dan Byi	Cakupan ANC dan Neonatus yang masih rendah	Akses yang mudah dan terjangkau ke tempat pelayanan Kesehatan Tersedianya Dana Jampersal
2.	Angka kematian bayi			
3.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Adanya Balita Stunting	Pemantauan Perkembangan/ Pertumbuhan Balita yang belum Optimal	Adanya kegiatan Posyandu Rutin setiap bulan
4.	IKM Pelayanan Kesehatan Dasar	Masih ada beberapa Pelayanan Dasar yang diberikan petugas belum maksimal	Masih kurang slogan 3 S (senyum, sapa dan Salam) dalam pemberian pelayanan oleh Petugas	Adanya Pedoman untuk menilai Indeks Kepuasan Masyarakat (PermenpanRB no 14 Tahun 2017)
5.	IKM Pelayanan Kesehatan Rujukan	Masih ada beberapa Pelayanan Rujukan yang diberikan petugas belum maksimal	Masih kurang slogan 3 S (senyum, sapa dan Salam) dalam pemberian pelayanan oleh Petugas	Adanya Pedoman untuk menilai Indeks Kepuasan Masyarakat (PermenpanRB no 14 Tahun 2017)
6.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis			
7.	Persentasi penurunan penderita penyakit tidak menular Hipertensi			
8.		Tingginya jumlah penderita penyakit tidak menular (Hipertensi)	Pola Makan dan Gaya Hidup Masyarakat yang tidak sehat	Adanya Program GERMAS : 1. Melakukan aktivitas fisik 30 menit/hr. 2. Mengonsumsi buah dan sayur, 3. Memeriksa kesehatan secara rutin Ketersediaan Obat yang cukup di Puskesmas

3.3. Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Provinsi

a. Renstra Kementerian Kesehatan

Berdasarkan mandat dari perangkat peraturan dan undang-undang terhadap tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan sesuai keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 maka tertuang Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia yaitu :

“Terwujudnya indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”.

Untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu :

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan dalam kabinet kerja.

Kementerian kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia.

b. Renstra Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Sulawesi Utara

Visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Sulawesi Utara adalah :

”Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari Dalam Ekonomi, Berdaulat Dalam Politik, Dan Berkepribadian Dalam Budaya Melalui Pembangunan

Kesehatan Yang Berkualitas Serta Berdaya Saing”

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi maka Misi Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Sulawesi Utara yang sehat, kuat dan berdaya saing.
2. Mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pemberdayaan masyarakat.
3. Mewujudkan akses pelayanan publik bidang kesehatan yang paripurna melalui pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan tersebut maka ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Memantapkan Koordinasi Lintas Program/Lintas Sektor;
2. Menggerakkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan kesehatan;
3. Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat miskinmaupun daerah terpencil, dan perbatasan;
4. Meningkatkan sistem surveilens, monitoring dan informasi kesehatan;
5. Membina sistem kesehatan dan sistem hukum dibidang kesehatan.

Uraian diatas tidak jauh berbeda dengan prinsip – prinsip yang perlu diperhatikan dan dijadikan acuan dari dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kota kotamobagu sebagaimana telah di jelaskan bagian sebelumnya.

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan pada Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu dilihat dari program wajib pembangunan daerah yang dilaksanakan antara lain :

Tabel 3.7 Telaahan Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kesehatan

No.	Indikator Kinerja Dinkes	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1.	Angka Kematian Ibu	- Cakupan Ante Natal Care yang masih Rendah;	Akses ke tempat Pelayanan Kesehatan yang mudah dan terjangkau. Tersedianya Dana Jampersal.

No.	Indikator Kinerja Dinkes	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
2.	Angka kematian bayi	- Cakupan Neonatus yang masih rendah. - Cakupan Kunjungan Bayi yang masih rendah.	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
3.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	- Pemantauan perkembangan / pertumbuhan balita yg tdk berjalan optimal	Pemberdayaan masyarakat lewat kegiatan posyandu Pelaksanaan kegiatan posyandu Rutin setiap Bulan
4.	IKM Pelayanan Kesehatan Dasar	Masih kurang slogan 3 S (senyum, sapa dan Salam) dalam pemberian pelayanan oleh Petugas	Adanya Pedoman untuk menilai Indeks Kepuasan Masyarakat (PermenpanRB no 14 Tahun 2017)
5.	IKM Pelayanan Kesehatan Rujukan	Masih kurang slogan 3 S (senyum, sapa dan Salam) dalam pemberian pelayanan oleh Petugas	Adanya Pedoman untuk menilai Indeks Kepuasan Masyarakat (PermenpanRB no 14 Tahun 2017)
6.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis	- Ketidakpatuhan pasien dalam minum obat	Ketersediaan Obat di Puskesmas yang cukup Adanya Program GERMAS : 1. Melakukan aktivitas fisik 30 menit/hr.
7.	Persentasi penurunan penderita penyakit tidak menular Hipertensi	Pola makan dan Gaya hidup masyarakat	2. Mengonsumsi buah dan sayur, 3. Memeriksa kesehatan secara rutin. Ketersediaan Obat yang cukup di Pu

3.3.1 Telaahan RENSTRA Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu dengan RENSTRA Kementerian Kesehatan

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tabel. 3.8 Telaahan Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pencapaian RENSTRA Kementerian Kesehatan

No.	Sasaran Jangka Menengah Kemenkes	Permasalahan Dinas Kesehatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	Keterbatasan anggaran dalam melaksanakan kegiatan pelayanan Kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan	Kebijakan di dasarkan kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Komitmen pimpinan untuk meningkatkan Derajat Kesehatan masyarakat
2	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan	Keterbatasan sarana dan Prasarana penunjang kegiatan pelayanan	Status Akreditasi RS rujukan belum ada yang Utama	Pelaksanaan Akreditasi diatur dalam Permenkes no.12 tahun 2020
		Akses dan mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum memadai	Masih ada Puskesmas yang terakreditasi Dasar dan Madya	Pelaksanaan Akreditasi diatur dalam Permenkes 43/2019
3	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	Meningkatnya kasus Penyakit Tidak Menular (PTM)	Pola Makan dan Gaya Hidup masyarakat yang tidak sehat	Adanya Program Germas: -Melakukan Aktivitas Fisik 30 Menit Perhari -Mengonsumsi Buah dan Sayur -memeriksa Kesehatan secara Rutin
4	Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	Keterbatasan anggaran dalam meningkatkan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	Sistem Pengadaan yang tidak fleksibel	Formularium Nasional

No.	Sasaran Jangka Menengah Kemenkes	Permasalahan Dinas Kesehatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
5	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar	Keterbatasan anggaran dalam pemenuhan SDM kesehatan yang mempunyai kompetensi sesuai standar	Belum terpenuhinya SDM yang sesuai standar	Adanya Ketentuan UU nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
6	Terjaminnya pembiayaan kesehatan	Keterbatasan anggaran jaminan pembiayaan Kesehatan	Berkurangnya Kuota PBI	Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam Instruksi Presiden (Inpres) no 1 Tahun 2022
7	Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih			
8	Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan			

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Pembangunan manusia dilakukan berlandaskan pada Tiga Pilar Pembangunan, yakni layanan dasar dan perlindungan sosial, produktivitas, dan pembangunan karakter. Melalui tiga pilar ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM menjadi sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkeadilan. Pilar layanan dasar dan perlindungan sosial mencakup tata kelola kependudukan, perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda. Pilar peningkatan produktivitas mencakup pendidikan dan pelatihan vokasi, pendidikan tinggi, penguatan IPTEK-Inovasi, dan peningkatan prestasi olah raga. Pilar pembangunan karakter mencakup revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, pemajuan dan pelestarian kebudayaan, penguatan moderasi beragama, peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Pembangunan kesehatan mempunyai peran sentral sebagai pondasi dalam peningkatan kualitas SDM, khususnya terkait aspek pembangunan sumber daya manusia sebagai modal manusia (*human capital*). Indeks modal manusia (*Human Capital Index*) mencakup parameter:

- 1) *Survival*, diukur dari probabilitas keberlangsungan hidup hingga umur 5 tahun (*probability of survival to age 5*),
- 2) Pendidikan, diukur dari ekspektasi jumlah tahun sekolah dan skor tes terharmonisasi (*expected years of schooling dan harmonized test scores*), dan
- 3) Kesehatan, diukur dari *survival rate* usia 15 – 60 tahun dan proporsi anak dibawah usia 5 tahun yang tidak mengalami *stunting*.

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya

Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi

Angka kematian ibu (*maternal mortality rate*) dan angka kematian bayi (*infant mortality rate*) merupakan indikator sensitif untuk mengukur keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan, dan juga sekaligus mengukur pencapaian indeks modal manusia. Pemerintah telah menetapkan penurunan angka kematian ibu sebagai *major project*, yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

2. Menurunkan angka *stunting* pada balita

Proporsi balita *stunting* sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Seperti halnya penurunan angka kematian ibu, pemerintah juga telah menetapkan percepatan penurunan *stunting* sebagai *major project* yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional

Sebagaimana diketahui bersama, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mampu memperbaiki akses pelayanan kesehatan baik ke FKTP maupun FKRTL dan juga telah memperbaiki keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar kelompok masyarakat. Namun demikian, pembiayaan JKN selama lima tahun terakhir telah mengalami ketidakseimbangan antara pengeluaran dan

pemasukan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi JKN, Kementerian Kesehatan memiliki peran sentral dalam kendali mutu dan kendali biaya (*cost containment*).

4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Sesuai dengan peta jalan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pemerintah telah bertekad untuk meningkatkan industri bahan baku obat dan juga peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri. Agar produksi dalam negeri ini dapat diserap oleh pasar, pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis untuk mendorong penggunaan obat dan alat kesehatan produksi dalam negeri.

Guna mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Peningkatan sumber daya kesehatan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Beberapa unsur yang terkandung dalam visi dan misi Kementerian Kesehatan tersebut diatas telah selaras dengan visi misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kotamobagu Tahun 2019-2023 khususnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dalam rangka meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.

3.3.2. Telaahan RENSTRA Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu dengan RENSTRA Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

**Tabel. 3.9 Telaahan Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pencapaian
RENSTRA Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara**

Sasaran Jangka Menengah Prov.Sulawesi Utara	Permasalahan Dinas Kesehatan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
“Terwujudnya Sulawesi Utara Yang Berdikari Dalam Ekonomi, Berdaulat Dalam Politik Serta Berkepribadian Dalam Budaya Melalui Pembangunan Kesehatan Yang Berkualitas Serta Berdaya Saing ”	Keterbatasan anggaran dalam melaksanakan kegiatan pelayanan Kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan	Kebijakan di dasarkan kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Komitmen pimpinan untuk meningkatkan Derajat Kesehatan masyarakat
	Keterbatasan sarana dan Prasarana penunjang kegiatan pelayanan	Status Akreditasi RS rujukan belum ada yang Utama	Pelaksanaan Akreditasi diatur dalam Permenkes no.12 tahun 2020
	Akses dan mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum memadai	Masih ada Puskesmas yang terakreditasi Dasar dan Madya	Pelaksanaan Akreditasi diatur dalam Permenkes 43/2019
	Meningkatnya kasus Penyakit Tidak Menular (PTM)	Pola Makan dan Gaya Hidup masyarakat yang tidak sehat	Adanya Program Gernas: -Melakukan Aktivitas Fisik 30 Menit Perhari -Mengonsumsi Buah dan Sayur -memeriksa Kesehatan secara Rutin

Visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Sulawesi Utara adalah :

"Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari Dalam Ekonomi, Berdaulat Dalam Politik, Dan Berkepribadian Dalam Budaya Melalui Pembangunan Kesehatan Yang Berkualitas Serta Berdaya Saing"

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi maka Misi Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Sulawesi Utara yang sehat, kuat dan berdaya saing.
2. Mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pemberdayaan masyarakat.
3. Mewujudkan akses pelayanan publik bidang kesehatan yang paripurna melalui pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan tersebut maka ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Memantapkan Koordinasi Lintas Program/Lintas Sektor;
2. Menggerakkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan kesehatan;
3. Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat miskin maupun daerah terpencil, dan perbatasan;
4. Meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan; Membina sistem kesehatan dan sistem hukum dibidang kesehatan.

Dari hasil telaahan Visi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Tujuan Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu telah sejalan dengan visi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu meningkatkan Derajat Kesehatan masyarakat.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup.

Pembangunan Pemanfaatan Ruang Wilayah Pemerintah Kota Kotamobagu sangat terkonsentrasi dengan pembangunan Kota jasa. Kedepan Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu akan melaksanakan penataan jaringan pengembangan Data dan Informasi Kesehatan melalui Sistem Informasi Kesehatan Daerah (Sikda), dengan tersedianya sistem jaringan yang terkoneksi dengan UPTD. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi sekarang ini, hal ini diharapkan mampu meningkatkan

kualitas pelayanan kesehatan yang baik diseluruh wilayah Kota Kotamobagu.

Tabel. 3.10 Telaahan Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pencapaian Rencana Tata Ruang Wilayah dan

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kotamobagu	Permasalahan Dinas Kesehatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pembangunan Pemanfaatan Ruang Wilayah Pemerintah Kota Kotamobagu sangat terkonsentrasi dengan pembangunan Kota jasa	penataan jaringan pengembangan data dan informasi Kesehatan melalui Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)	- Belum terintegrasinya sistem database kesehatan antara database Dinkes dan SIKDA UPTD serta database kesehatan yang belum terbangun dan terkoneksi. - Rasio Tenaga Kesehatan terhadap layanan publik.	- Adanya komitmen aparaturnya untuk lebih meningkat dalam memberikan pelayanan; - Tersedianya sarana prasarana Data dan informasi kesehatan sebagai penyedia database kesehatan yang valid dan dapat dikembangkan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis pada RPJMD 2019-2023 merupakan tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya untuk dilaksanakan dan diselesaikan secara berkesinambungan. Prioritas utama pembangunan ketiga pada penentuan isu-isu strategis adalah meningkatkan pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data riil didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik.

Kualitas kinerja pemerintah daerah perlu untuk ditingkatkan baik dari sisi mental dan etos kerja birokratnya, manajemen kelembagaan dan infrastruktur penunjangnya. Peningkatan etos kerja birokrat dapat dilakukan melalui penerapan disiplin pegawai dengan peningkatan kinerja, manajemen kelembagaan dapat ditingkatkan melalui pembenahan tatalaksana organisasi sedangkan penguatan infrastruktur pemerintahan dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi informasi (TI).

Berikut isu-isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan RENSTRA Tahun 2019-2023 berdasarkan tupoksi Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu :

1. Upaya kesehatan
 - a. Kesehatan ibu
 - b. Kesehatan anak
2. Gizi masyarakat
3. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
4. Penyakit menular
 - a. Tuberkulosis
 - b. HIV/AIDS
 - c. Penyakit infeksi baru (Covid-19)
5. Faktor risiko kesehatan lingkungan
6. Pelayanan kesehatan
 - a. Layanan kesehatan primer
 - b. Layanan kesehatan sekunder
7. Sumber daya manusia kesehatan
8. Tata kelola pembangunan kesehatan, integrasi sistem informasi, serta penelitian dan pengembangan kesehatan
9. Pembiayaan kesehatan
10. Sediaan farmasi dan alat kesehatan
11. Pemberdayaan masyarakat dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu.

Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu berdasarkan visi dan misi RPJMD Kota Kotamobagu tahun 2019-2023 yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -		
				III	IV	V
1	2	4	5	8	9	10
1.	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan serta menurunkan morbiditas	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan serta menurunnya morbiditas	Angka kematian ibu	296,43	290,50	284,69
			Angka kematian bayi	7,80	7,64	7,49
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	4,89	4,69	4,51
			IKM Pelayanan Kesehatan Dasar	Baik	Baik	Baik
			IKM Pelayanan Kesehatan Rujukan	Baik	Baik	Baik
			Tingkat prevalensi Tuberkulosis	190,00	180,50	171,48
			Persentasi penurunan penderita penyakit tidak menular Hipertensi	6,97	6,62	6,29

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Perangkat Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;
2. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap *segment* masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Perangkat Daerah; dan
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

5.2 Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional.
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan melanggar kepentingan umum.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI: KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PUSAT PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING			
MISI PERTAMA : Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat berbasis modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan akses dan mutu pelayanan serta menurunkan morbiditas	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan serta menurunnya morbiditas	Menyelenggarakan Akreditasi PKM	Peningkatan Mutu Pelayanan
		Menyelenggarakan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang merata dan terjangkau	Meningkatnya Kualitas Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah Kota Kotamobagu
		Menyelenggarakan Pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau	Meningkatkan Kualitas Pengendalian Penyakit Menular, PTM dan penyakit berbasis Lingkungan.
		Menyelenggarakan Pelayanan kesehatan Ibu dan Anak secara komprehensif	Program Peningkatan Kesehatan dan Keselamatan ibu & Anak.
		Menyelenggarakan Pelayanan Perbaikan Gizi secara komprehensif	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Gizi dgn Penerapan 4 Pilar Gizi Seimbang
		Meningkatkan kinerja sistem informasi kesehatan daerah	Pengembangan Sistem informasi kesehatan daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan ke dalam beberapa program dan kegiatan beserta kebutuhan pendanaan secara indikatif dan bertahap selama Periode Tahun 2021 - 2023.

Program adalah bentuk dari suatu instrumen kebijakan yang berisi beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang telah direncanakan dalam RPJMD Perubahan Kota Kotamobagu 2021–2023. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program yang berperan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah. Setiap program memiliki kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2021–2023 yang merupakan tindakan nyata yang dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan semaksimal mungkin.

Indikator kinerja secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja capaian program, masukan keluaran, hasil maupun dampak sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan.

Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang akan melaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan dalam Renstra. Adapun Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu tersaji dalam tabel 6.1 di bawah ini:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Tahun 2021 – 2023

1. Dinas Kesehatan

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan								
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Dukungan Kinerja Dinas Kesehatan	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang Sesuai SOP (%)				0	95,00	41.708.244.000	95,00	42.185.923.870	95,00	43.310.045.064	95,00	127.204.212.934
				1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	0	100,00	41.708.244.000	100,00	42.185.923.870	100,00	43.310.045.064	100,00	127.204.212.934
				01. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)		100,00	40.000.000.000	100,00	41.000.000.000	100,00	42.000.000.000		123.000.000.000
				01. 02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN (Bulan)		14,00	40.000.000.000	14,00	41.000.000.000	14,00	42.000.000.000		123.000.000.000
				01. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan (%)		100,00	161.500.000	100,00	105.000.000	100,00	174.825.000		441.325.000
				01. 05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Pelaksanaan BIMTEK/DIK LAT (Orang/Kali)		- ,00	100.000.000	5,00	105.000.000	6,00	110.250.000		315.250.000

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan								
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
				01. 05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan nnyayang diadakan (Pasang)		123,00	61.500.000	,00	-	123,00	64.575.000		126.075.000
				01. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		100,00	308.054.600	100,00	252.800.000	100,00	265.690.000		826.544.600
				01. 06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang disediakan makanan dan minuman (Orang/Dos)		600,00	9.000.000	630,00	9.450.000	662,00	9.922.500		28.372.500
				01. 06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantoryang disediakan (Bulan/Liter/Lusin/Buah/Rim/Botol/Dos/Rol/Pak)		1.590,00	28.000.000	1.670,00	29.400.000	1.753,00	30.870.000		88.270.000
				01. 06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Lembar/Meter)		6.140,00	2.500.000	6.447,00	2.625.000	6.769,00	2.756.250		7.881.250
				01. 06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantoryang disediakan (Unit)		16,00	72.054.600	,00	-	,00	-		72.054.600

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan								
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
				01. 06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan (buah, meter /roll)		- ,00	-	5,00	5.000.000	5,00	5.500.000		10.500.000
				01. 06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kali)		38,00	196.500.000	40,00	206.325.000	42,00	216.641.250		619.466.250
				01. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu (%)		100,00	459.600.000	100,00	10.080.000	100,00	10.584.000		480.264.000
				01. 07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang diadakan (Unit)		2,00	9.600.000	2,00	10.080.000	2,00	10.584.000		30.264.000
				01. 07. 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan jabatan yang diadakan (Unit)		1,00	450.000.000	,00	-	,00	-		450.000.000
				01. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00	524.400.000	100,00	550.620.000	100,00	578.151.000		1.653.171.000

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan								
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
						(%)									
				01. 08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai (Lembar)		300,00	3.000.000	315,00	3.150.000	331,00	3.307.500		9.457.500
				01. 08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan administrasi jasa Pelayanan Umum Kantor (Bulan)		12,00	435.600.000	12,00	457.380.000	12,00	480.249.000		1.373.229.000
				01. 08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)		12,00	85.800.000	12,00	90.090.000	12,00	94.594.500		270.484.500
				01. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (%)		100,00	254.689.400	100,00	267.423.870	100,00	280.795.064		802.908.334
				01. 09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Perorangan (Unit)		1,00	77.720.400	1,00	81.606.420	1,00	85.686.741		245.013.561

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan								
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
				01. 09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)		1,00	10.000.000	1,00	10.500.000	1,00	11.025.000		31.525.000
				01. 09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin dan peralatan gedung kantoryang dipelihara (Unit)		28,00	26.000.000	28,00	27.300.000	28,00	28.665.000		81.965.000
				01. 09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan (Unit)		44,00	140.969.000	44,00	148.017.450	44,00	155.418.323		444.404.773
	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan serta Menurunnya Morbiditas	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan serta Menurunnya Morbiditas	Persentasi Penurunan Penderita Penyakit Tidak Menular Hipertensi (%)				0	6,97	37.206.220.029	6,62	40.594.473.334	6,29	38.699.634.406	6,29	116.500.327.769
			IKM Pelayanan Kesehatan Dasar (Indeks Konversi)					BAIK		BAIK		BAIK		BAIK	
			Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)				0	4,89		4,69		4,51		4,51	
			Angka Kematian Bayi (Per 1000 Kelahiran Hidup)				0	7,80		7,64		7,49		7,49	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan								
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
			Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)				0	190,00		180,50		171,48		171,48	
			IKM Pelayanan Kesehatan Rujukan (Indeks Konversi)					BAIK		BAIK		BAIK		BAIK	
			Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)				0	296,43		290,50		284,69		284,69	
				2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	0	100,00	34.850.078.829	100,00	38.371.804.734	100,00	36.344.098.946	100,00	109.565.982.509
						Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	0	100,00		100,00		100,00		100,00	
						Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	0	100,00		100,00		100,00		100,00	
						Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	0	100,00		100,00		100,00		100,00	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan								
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
						Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk (%)	0	0,42		0,42		0,42		0,42	
						Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	0	100,00		100,00		100,00		100,00	
						Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	0	100,00		100,00		100,00		100,00	
						Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	0	100,00		100,00		100,00		100,00	
						Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	0	100,00		100,00		100,00		100,00	
						Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	0	100,00		100,00		100,00		100,00	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan								
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
						Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	0	100,00		100,00		100,00		100,00	
						Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang Terakreditasi (%)	0	100,00		100,00		100,00		100,00	
						Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	0	100,00		100,00		100,00		100,00	
						Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	0	100,00		100,00		100,00		100,00	
				02. 01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Angka Rujukan Ke Rumah Sakit Melalui Peningkatan Fasilitas Puskesmas (%)		10,00	4.602.403.200	10,00	6.510.136.200	10,00	5.614.321.152		16.726.860.552
				02. 01. 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alat kalibrasi yang diadakan dan dipelihara (Unit)		- ,00	-	37,00	51.500.000	37,00	53.045.000		104.545.000

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan								
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
				02. 01. 11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang direhabilitasi /dipelihara (Unit)		- ,00	-	2,00	431.000.000	2,00	678.000.000		1.109.000.000
				02. 01. 18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara (Unit)		- ,00	-	2,00	200.000.000	3,00	300.000.000		500.000.000
				02. 01. 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/penunjang medik yang diadakan (Paket)		2,00	454.309.000	2,00	1.161.998.200	34,00	603.674.352		2.219.981.552
				02. 01. 21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah waktu distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan lainnya (Bulan)		12,00	50.000.000	12,00	55.000.000	12,00	60.000.000		165.000.000
				02. 01. 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang direhabilitasi (Unit)		- ,00	-	3,00	1.101.000.000	,00	112.500.000		1.213.500.000
						Jumlah Puskesmas Yang		- ,00		4,00		5,00			

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan								
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
						Dipelihara (Unit)									
				02. 01. 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan habis pakai yang diadakan (Pcs)		328.654,00	1.057.691.000	328.654,00	1.163.460.100	328.654,00	1.279.806.110		3.500.957.210
				02. 01. 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan (Unit)		28,00	1.740.000.000	1,00	500.000.000	1,00	550.000.000		2.790.000.000
				02. 01. 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)		- ,00	-	50,00	110.000.000	50,00	120.000.000		230.000.000
				02. 01. 06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Utilitas Puskesmas Yang dikembangkan (Paket)		1,00	17.514.200	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000		117.514.200
				02. 01. 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang diadakan (Pcs)		3.610.430,00	1.282.889.000	3.610.430,00	1.411.177.900	3.610.430,00	1.552.295.690		4.246.362.590
				02. 01. 12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan		- ,00	-	1,00	175.000.000	1,00	105.000.000		280.000.000

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan								
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
						(Unit)									
				02. 01. 19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana yang dipelihara (Unit)		- ,00	-	2,00	100.000.000	3,00	150.000.000		250.000.000
				02. 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas dengan IKM minimal Baik (Unit)		2,00	29.979.075.629	4,00	31.541.568.534	5,00	30.473.432.794		91.994.076.957
				02. 02. 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Kematian penderita wabah covid-19 (Orang)		15,00	1.688.899.530	10,00	250.000.000	5,00	275.000.000		2.213.899.530
				02. 02. 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)		100,00	21.512.800	100,00	23.664.080	100,00	26.030.488		71.207.368
				02. 02. 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Anak Sekolah Yang Mendapatkan Pemeriksaan Deteksi Penggunaan Zat Adiktif (Siswa)		3.500,00	170.000.000	3.323,00	166.150.000	3.156,00	157.800.000		493.950.000

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan								
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
				02. 02. 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya yang dilaksanakan (Kegiatan)		1,00	50.000.000	1,00	51.500.000	1,00	53.045.000		154.545.000
				02. 02. 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)		100,00	39.522.000	100,00	49.566.000	100,00	53.610.000		142.698.000
				02. 02. 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Penjamah Makanan Yang Dilatih Dan Mendapat Sertifikat (Orang)		- ,00	122.313.200	150,00	134.544.520	128,00	147.998.972		404.856.692
					Jumlah Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman (TPM) yang diawasi/dioperasikan (Unit)		155,00	170,00		187,00					
					Jumlah Puskesmas Yang Memiliki Pengolahan Limbah Medis Sesuai Standar (Unit)		5,00	5,00		5,00					

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan								
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
				02. 02. 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar (%)		100,00	337.677.700	100,00	371.445.470	100,00	408.590.017		1.117.713.187
				02. 02. 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah spesimen yang dikirim (Spesimen)		2.000,00	255.430.000	1.000,00	200.000.000	1.000,00	220.000.000		675.430.000
				02. 02. 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah pelaksanaan investigasi kewaspadaan dini dan respon wabah (Kali)		- ,00	-	25,00	22.500.000	25,00	22.500.000		45.000.000
				02. 02. 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)		100,00	16.255.900	100,00	17.881.490	100,00	19.669.639		53.807.029
				02. 02. 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah rujukan pengujian spesimen surveilans rutin dan sentinel (sampel)		30,00	71.922.000	25,00	89.788.000	20,00	90.038.000		251.748.000
					Jumlah Penanganan surveilans Haji (orang)		145,00	150,00		155,00					

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan								
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
				02. 02. 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)		100,00	6.066.000	100,00	55.776.040	100,00	55.776.040		117.618.080
				02. 02. 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Alat Tes Kebugaran Kit Untuk Sekolah (Unit)		2,00	15.000.000	3,00	22.500.000	2,00	15.000.000		52.500.000
						Jumlah Siswa Yang Melakukan Pengukuran Kebugaran (Siswa)		4.500,00		5.760,00		6.900,00			
				02. 02. 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah kunjungan pasien BPJS/KIS/JKN di Fasyankes Tingkat I (Orang)		154.418,00	13.104.260.200	161.235,00	13.110.326.200	136.003,00	11.539.232.200		37.753.818.600
				02. 02. 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)		100,00	-	100,00	85.408.000	100,00	85.408.000		170.816.000
				02. 02. 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penurunan Penyakit menular akibat gigitan nyamuk (Kasus)		95,00	259.715.200	90,00	285.686.720	85,00	314.255.392		859.657.312

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan								
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
				02. 02. 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah anak dan balita yang mendapatkan pelayanan imunisasi (Anak)		4.785,00	2.022.000	5.024,00	94.600.000	5.275,00	94.600.000		191.222.000
				02. 02. 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (%)		100,00	363.772.100	100,00	400.149.310	100,00	440.164.241		1.204.085.651
				02. 02. 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah fasyankes yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional dan lainnya (Unit)		1,00	50.000.000	2,00	100.000.000	3,00	150.000.000		300.000.000
				02. 02. 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)		100,00	43.987.995	100,00	69.244.000	100,00	69.244.000		182.475.995
				02. 02. 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah keluarga program PIS-PK (Keluarga)		27.884,00	12.547.800.000	33.461,00	15.057.446.400	33.814,00	15.216.300.000		42.821.546.400
				02. 02. 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Penurunan angka penderita Stunting (orang)		3,00	168.101.000	2,00	184.911.100	2,00	203.402.210		556.414.310

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan								
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
				02. 02. 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kasus penyakit menular dan tidak menular yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Kasus)		1.220,00	18.000.000	1.210,00	30.000.000	1.200,00	30.000.000		78.000.000
				02. 02. 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)		100,00	40.723.500	100,00	44.795.850	100,00	49.275.435		134.794.785
				02. 02. 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya (Unit)		4,00	288.781.000	4,00	418.230.000	4,00	380.000.000		1.087.011.000
						Jumlah Puskesmas terakreditasi minimal utama (Unit)		1,00		3,00		1,00			
				02. 02. 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)		100,00	47.110.000	100,00	65.110.000	100,00	65.110.000		177.330.000
				02. 02. 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan		100,00	49.268.504	100,00	54.195.354	100,00	59.614.890		163.078.748

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan								
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
						(%)									
				02. 02. 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah promosi kesehatan yang dilaksanakan (Kali)		240,00	50.000.000	240,00	51.500.000	240,00	53.045.000		154.545.000
				02. 02. 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)		100,00	10.959.300	100,00	34.650.000	100,00	24.750.000		70.359.300
				02. 02. 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Capaian Tataan Kota Sehat (Dokumen)		6,00	139.975.700	,00	-	7,00	153.973.270		293.948.970
				02. 03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah fasyankes yang telah melaksanakan SIK secara terintegrasi (Unit)		3,00	218.600.000	4,00	268.600.000	5,00	203.300.000		690.500.000
				02. 03. 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas Yang Menerapkan Sistem Informasi Terintegrasi (Unit)		1,00	38.000.000	2,00	38.000.000	2,00	38.000.000		114.000.000
				02. 03. 03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah alat/perangkat SIK yang diadakan (Unit)		2,00	130.600.000	2,00	130.600.000	1,00	65.300.000		326.500.000

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan								
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
				02. 03. 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah puskesmas yang menerapkan sistem informasi pendaftaran dan pelayanan (Unit)		1,00	50.000.000	2,00	100.000.000	2,00	100.000.000		250.000.000
				02. 04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan (%)		100,00	50.000.000	100,00	51.500.000	100,00	53.045.000		154.545.000
				02. 04. 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang ditingkatkan mutunya (Unit)		6,00	50.000.000	6,00	51.500.000	6,00	53.045.000		154.545.000
				3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang terakreditasi sesuai standar (%)	0	90,00	1.548.000.000	90,00	1.242.000.000	90,00	1.242.000.000	90,00	4.032.000.000
				03. 01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik (Orang)		600,00	20.000.000	745,00	50.000.000	745,00	50.000.000		120.000.000
				03. 01. 02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak	Jumlah pengawasan perizinan praktik tenaga kesehatan		128,00	20.000.000	308,00	50.000.000	309,00	50.000.000		120.000.000

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan								
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
					Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	(Kali)									
				03. 02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDMK (Dokumen)		1,00	1.228.000.000	1,00	892.000.000	1,00	892.000.000		3.012.000.000
				03. 02. 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah pembinaan dan pengawasan SDMK yang dilaksanakan (Kali)		4,00	200.000.000	4,00	200.000.000	4,00	200.000.000		600.000.000
				03. 02. 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah SDMK Yang Menerima Honorarium (Orang)		20,00	828.000.000	11,00	492.000.000	11,00	492.000.000		1.812.000.000
				03. 02. 01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah workshop kegiatan perencanaan SDMK (Kali)		4,00	200.000.000	4,00	200.000.000	4,00	200.000.000		600.000.000
				03. 03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDMK yang lulus uji kompetensi (Orang)		100,00	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00	300.000.000		900.000.000

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan								
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
				03. 03. 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mengikuti uji kompetensi (Orang)		100,00	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00	300.000.000		900.000.000
				4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Yang Memiliki Izin (%)	0	100,00	222.426.000	100,00	378.668.600	100,00	416.535.460	100,00	1.017.630.060
				04. 01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah sarana yang memiliki izin (Unit)		54,00	42.426.000	60,00	46.668.600	60,00	51.335.460		140.430.060
				04. 01. 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat	Jumlah sarana yang diawasi (Unit)		54,00	42.426.000	60,00	46.668.600	60,00	51.335.460		140.430.060

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan								
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
					Tradisional (UMOT)										
				04. 03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase sarana P-IRT yang memiliki Izin (%)		100,00	90.000.000	100,00	100.000.000	100,00	110.000.000		300.000.000
				04. 03. 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah	Jumlah P-IRT yang diawasi dan dilakukan tindak lanjut (Unit)		159,00	90.000.000	174,00	100.000.000	191,00	110.000.000		300.000.000

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan								
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
					Tangga										
				04. 04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah sertifikat yang diterbitkan (Lembar)		245,00	-	269,00	132.000.000	295,00	145.200.000		277.200.000
				04. 04. 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah sarana TPM yang diperiksa (Unit)		245,00	-	269,00	132.000.000	295,00	145.200.000		277.200.000

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan								
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
				04. 06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase I-RTP yang diawasi (%)		100,00	90.000.000	100,00	100.000.000	100,00	110.000.000		300.000.000
				04. 06. 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah I-RTP yang diperiksa, diawasi, dan ditindaklanjuti (Unit)		159,00	90.000.000	174,00	100.000.000	191,00	110.000.000		300.000.000
				5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase OPD yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat (%)	0	90,00	585.715.200	90,00	602.000.000	90,00	697.000.000	90,00	1.884.715.200
				05. 01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah MOU Yang Dihasilkan Dalam Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor		- ,00	75.715.200	2,00	51.500.000	3,00	70.000.000		197.215.200

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan								
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
						Tingkat Daerah Kab./Kota (Dokumen)									
				05. 01. 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan (Kali)		4,00	75.715.200	4,00	51.500.000	4,00	70.000.000		197.215.200
				05. 02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Promotif Preventif (Desa/Kel)		10,00	110.000.000	11,00	110.500.000	12,00	143.000.000		363.500.000
				05. 02. 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Desa/Kel Yang Melaksanakan Salah Satu Kegiatan Germas Yaitu Deteksi Dini Penyakit (Desa/Kel)		10,00	110.000.000	10,00	110.500.000	13,00	143.000.000		363.500.000

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan								
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
				05. 03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan yang dilaksanakan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) (Desa/Kel)		10,00	400.000.000	11,00	440.000.000	12,00	484.000.000		1.324.000.000
				05. 03. 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Kader Yang Menerima Insentif Dalam Rangka Pengembangan UKBM (Kali)		260,00	400.000.000	260,00	440.000.000	260,00	484.000.000		1.324.000.000
						Jumlah bimbingan teknis dan supervisi UKBM yang dilaksanakan (Kali)		2,00		2,00		2,00			
	TOTAL								78.914.464.029		82.780.397.204		82.009.679.470		243.704.540.703

2. UPTD Rumah Sakit

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan								
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
				1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100,00	2.706.212.550	100,00	3.211.261.750	100,00	3.677.500.000	100,00	9.594.974.300
				01. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Disiplin Aparatur Sipil Negara (%)		100,00	60.402.000	100,00	65.000.000	100,00	65.000.000		190.402.000
				01. 05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan (Pasang)		115,00	60.402.000	115,00	65.000.000	115,00	65.000.000		190.402.000
				01. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		100,00	462.439.000	100,00	511.500.000	100,00	652.000.000		1.625.939.000
				01. 06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang disediakan makanan dan minuman (Orang/Dos)		500,00	11.250.000	500,00	11.500.000	550,00	12.000.000		34.750.000
				01. 06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Lembar/Meter)		35.400,00	74.489.000	36.000,00	80.000.000	36.500,00	90.000.000		244.489.000

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan								
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
				01. 06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantoryang disediakan (Bulan/Liter/ Lusin/Buah/ Rim/Botol/ Dos/Rol/Pak)		10.614,00	200.000.000	10.800,00	220.000.000	11.000,00	250.000.000		670.000.000
				01. 06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kali)		51,00	176.700.000	60,00	200.000.000	70,00	300.000.000		676.700.000
				01. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu (%)		90,00	98.859.750	90,00	98.859.750	90,00	150.000.000		347.719.500
				01. 07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang diadakan (Unit)		10,00	98.859.750	10,00	98.859.750	10,00	150.000.000		347.719.500
				01. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		100,00	1.227.291.800	100,00	1.603.800.000	100,00	1.785.500.000		4.616.591.800
				01. 08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)		12,00	1.200.801.800	12,00	1.576.800.000	12,00	1.758.000.000		4.535.601.800

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan								
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
				01. 08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai (Lembar)		250,00	2.490.000	300,00	3.000.000	350,00	3.500.000		8.990.000
				01. 08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan administrasi jasa Pelayanan Umum Kantor (Bulan)		12,00	24.000.000	12,00	24.000.000	12,00	24.000.000		72.000.000
				01. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (%)		90,00	728.268.000	90,00	773.150.000	90,00	845.000.000		2.346.418.000
				01. 09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin dan peralatan gedung kantoryang dipelihara (Unit)		53,00	172.710.000	60,00	183.150.000	65,00	200.000.000		555.860.000
				01. 09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan (Unit)		18,00	470.398.000	20,00	500.000.000	22,00	550.000.000		1.520.398.000
				01. 09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Perorangan		2,00	85.160.000	2,00	90.000.000	2,00	95.000.000		270.160.000

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan								
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
					Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(Unit)									
				01. 10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan BLUD sesuai SOP (%)		100,00	128.952.000	100,00	158.952.000	100,00	180.000.000		467.904.000
				01. 10. 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD)		21,00	128.952.000	21,00	158.952.000	21,00	180.000.000		467.904.000
				2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA T	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit (%)	80,6	82,00	87.692.356.943	85,00	81.443.839.440	90,00	83.014.160.000	90,00	252.150.356.383
				02. 01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di Rumah Sakit (%)		78,42	41.442.490.453	85,00	34.156.275.350	90,00	33.823.960.000		109.422.725.803
				02. 01. 05	Pengembang an Rumah Sakit	Jumlah konstruksi fisik yang dibangun (Unit)		3,00	13.904.777.218	3,00	12.545.675.350	3,00	11.373.960.000		37.824.412.568

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan								
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
				02. 01. 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Rumah Sakit yang dipelihara (Unit)		283,00	267.644.150	285,00	300.000.000	290,00	500.000.000		1.067.644.150
				02. 01. 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana dan pendukung rumah sakit yang diadakan (Paket)		3,00	302.900.050	3,00	303.000.000	3,00	350.000.000		955.900.050
				02. 01. 18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana Rumah Sakit yang dipelihara (Paket)		2,00	225.000.000	3,00	390.000.000	4,00	450.000.000		1.065.000.000
				02. 01. 12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah dan jenis sarana rumah sakit yang diadakan (Unit/Buah/ Paket)		10,00	117.600.000	10,00	117.600.000	10,00	150.000.000		385.200.000
				02. 01. 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Paket obat-obatan yang diadakan RS (Paket)		3,00	6.963.470.535	3,00	7.000.000.000	3,00	10.000.000.000		23.963.470.535
				02. 01. 08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah bangunan yang direhabilitasi dan dipelihara (Unit)		6,00	2.691.707.200	6,00	3.500.000.000	6,00	4.000.000.000		10.191.707.200
				02. 01. 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang	Jumlah alat kesehatan/penunjang medik yang diadakan		3,00	16.969.391.300	3,00	10.000.000.000	3,00	7.000.000.000		33.969.391.300

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan								
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
					Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	(Paket)									
				02. 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan (%)		100,00	45.955.039.090	100,00	46.922.564.090	100,00	48.725.200.000		141.602.803.180
				02. 02. 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Pelayanan Rujukan Pasien (Kali)		240,00	4.041.400.000	250,00	4.125.200.000	300,00	4.425.200.000		12.591.800.000
						Jumlah Tenaga Penunjang Operasional Rumas Sakit (Orang)		145,00		145,00		145,00			
				02. 02. 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Waktu pelaksanaan pelayanan pasien peserta JKN (Bulan)		12,00	38.797.364.090	12,00	38.797.364.090	12,00	40.000.000.000		117.594.728.180
				02. 02. 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Waktu penyediaan pelayanan makanan dan minuman pasien (Bulan)		12,00	3.116.275.000	12,00	3.500.000.000	12,00	3.750.000.000		10.366.275.000
				02. 02. 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	Terlaksanay a Akreditasi Rumah Sakit (Tahun)		- ,00	-	1,00	500.000.000	1,00	550.000.000		1.050.000.000

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan								
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
				02. 03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi di Rumah Sakit (%)		80,00	112.500.000	90,00	115.000.000	100,00	115.000.000		342.500.000
				02. 03. 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah tenaga petugas SIM-RS (Orang)		9,00	112.500.000	9,00	115.000.000	9,00	115.000.000		342.500.000
						Jumlah alat penunjang sistem informasi kesehatan yang diadakan (Unit)		- ,00		75,00		80,00			
				02. 04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan (%)		90,00	182.327.400	90,00	250.000.000	90,00	350.000.000		782.327.400
				02. 04. 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya pengembangan tipe rumah sakit (Tahun)		1,00	182.327.400	1,00	250.000.000	1,00	350.000.000		782.327.400
				3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Pemenuhan tenaga kesehatan yang sesuai standar tipe Rumah sakit (%)	49,52	18,75	5.276.832.800	17,97	5.000.000.000	17,66	4.800.000.000	54,38	15.076.832.800

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan								
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
				03. 02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai kompetensi (%)		18,75	5.276.832.800	17,66	5.000.000.000	17,97	4.800.000.000		15.076.832.800
				03. 02. 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah diklat kompetensi bidang kesehatan (Kegiatan)		12,00	5.276.832.800	12,00	5.000.000.000	12,00	4.800.000.000		15.076.832.800
						Jumlah kebutuhan sumber daya manusia kesehatan (Orang)		345,00		300,00		200,00			
	TOTAL								95.675.402.293		89.655.101.190		91.491.660.000		276.822.163.483

3. UPTD Farmasi

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan								
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
				1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	0	95,00	610.916.400	95,00	761.000.000	95,00	736.000.000	95,00	2.714.916.400
				01. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		100,00	174.000.000	100,00	189.000.000	100,00	194.000.000		980.000.000
				01. 06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantoryang disediakan (Unit)		- ,00	-	95,00	15.000.000	95,00	10.000.000		75.000.000
				01. 06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang disediakan makanan dan minuman (Orang/Dos)		95,00	2.000.000	95,00	2.000.000	95,00	2.000.000		10.000.000
				01. 06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan (buah, meter/roll)		100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000		10.000.000

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan								
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
				01. 06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Lembar/Meter)		95,00	5.000.000	95,00	5.000.000	95,00	5.000.000		25.000.000
				01. 06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantoryang disediakan (Bulan/Liter/Lusin/Buah/Rim/Botol/Dos/Rol/Pak)		100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000		75.000.000
				01. 06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kali)		95,00	150.000.000	95,00	150.000.000	95,00	160.000.000		785.000.000
				01. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu (%)		95,00	250.000.000	95,00	370.000.000	95,00	345.000.000		965.000.000
				01. 07. 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun (Unit)		95,00	250.000.000	95,00	275.000.000	95,00	300.000.000		825.000.000

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan								
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
				01. 07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang diadakan (Unit)		95,00	-	- ,00	45.000.000	- ,00	-		45.000.000
				01. 07. 05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan (Unit)		95,00	-	95,00	50.000.000	95,00	45.000.000		95.000.000
				01. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		100,00	92.000.000	100,00	92.000.000	100,00	92.000.000		460.000.000
				01. 08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan administrasi jasa Pelayanan Umum Kantor (Bulan)		100,00	60.000.000	100,00	60.000.000	100,00	60.000.000		300.000.000
				01. 08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik (Bulan)		100,00	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	30.000.000		150.000.000
				01. 08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai (Lembar)		95,00	2.000.000	95,00	2.000.000	95,00	2.000.000		10.000.000
				01. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		95,00	94.916.400	95,00	110.000.000	95,00	105.000.000		309.916.400

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan								
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
						yang terpelihara (%)									
				01. 09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin dan peralatan gedung kantoryang dipelihara (Unit)		11,00	7.710.000	11,00	30.000.000	11,00	30.000.000		67.710.000
				01. 09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan (Unit)		5,00	85.000.000	5,00	75.000.000	5,00	70.000.000		230.000.000
				01. 09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)		1,00	2.206.400	1,00	5.000.000	1,00	5.000.000		12.206.400
				2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terlaksananya Pemusnahan Obat Dan Perbekalan Kesehatan serta Koordinasi tentang mutu obat (paket/kali)	0	95,00	45.000.000	95,00	45.000.000	95,00	45.000.000	95,00	135.000.000

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan								
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
				02.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase obat dan BMHP yang didistribusikan ke fasilitas kesehatan pada pelayanan dasar (%)		95,00	45.000.000	95,00	45.000.000	95,00	45.000.000		135.000.000
				02.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya yang dilaksanakan (Kegiatan)		5,00	45.000.000	5,00	45.000.000	5,00	45.000.000		135.000.000
	TOTAL								655.916.400		806.000.000		781.000.000		2.849.916.400

Adapun secara rinci target pelayanan berdasarkan kebutuhan dan prioritas Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu dalam mencapai Visi dan Misi untuk Tahun 2021–2023 pada **Sasaran Meningkatnya akses dan mutu pelayanan serta menurunnya morbiditas**, masing–masing kegiatan dapat kami sampaikan sebagai penunjang Indikator Sasaran sebagai berikut :

Indikator Sasaran I : Angka kematian ibu

1. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a.Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil.

Target pemenuhan capaian persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Yaitu 100%. Sasaran ibu hamil untuk perhitungan capaian/Persentase diperoleh dari data *real*/ Jumlah Ibu hamil Tahun Sebelumnya. Formula yang digunakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 adalah sebagai berikut : Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (Nominator) / Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator) x 100 %

b.Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin.

Target pemenuhan capaian persentase ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Yaitu 100%. Sasaran ibu bersalin untuk perhitungan capaian/Persentase diperoleh dari data *real*/ Jumlah Ibu bersalin Tahun Sebelumnya. Formula yang digunakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 adalah sebagai berikut : Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama. x 100 %

Indikator Sasaran II : Angka kematian Bayi

1. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir.

Target pemenuhan capaian persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Yaitu 100%. Sasaran bayi baru lahir untuk perhitungan capaian/Persentase diperoleh dari data *real* Jumlah bayi baru lahir Tahun Sebelumnya. Formula yang digunakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 adalah sebagai berikut : Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama 100 %.

Indikator Sasaran III : Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita

1. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita.

Target pemenuhan capaian persentase bayi balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Yaitu 100%. Sasaran balita untuk perhitungan capaian/Persentase diperoleh dari data *real* Jumlah balita Tahun Sebelumnya. Formula yang digunakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 adalah sebagai berikut : Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar / Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama X 100%

b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Indikator kinerja Sub kegiatan Pengelolaan pelayanan gizi masyarakat adalah Jumlah Penurunan angka penderita Stunting (orang). Penurunan prevalensi wasting dan stunting pada balita merupakan sasaran pokok RPJMN 2020-2024. Proporsi balita stunting sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Seperti halnya penurunan angka kematian

ibu, pemerintah juga telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai major project yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

Indikator Sasaran IV : IKM Pelayanan Kesehatan Dasar

1. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan atau Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya. dalam hal ini Yang merupakan FKTP sebagai Unit Pelakssana Teknis Dinas (UPTD) adalah Puskesmas. Survei Kepuasan Masyarakat adalah survei yang dilakukan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan dalam rangka mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan (Permenpan-RB no 14/2017).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan kategori minimal baik meliputi 2 jenis indeks: 1) IKM dengan kategori baik; yaitu hasil kinerja pelayanan yang memiliki nilai meliputi: nilai persepsi sebesar 3; nilai interval (NI) sebesar 3,0644 - 3,532; nilai interval konversi (NIK) sebesar 76,61 - 88,30; dan mutu pelayanan (x) B. 2) IKM dengan kategori sangat baik; yaitu hasil kinerja pelayanan yang memiliki nilai meliputi: nilai persepsi sebesar 4; nilai interval (NI) sebesar 3,5324 - 4,00; nilai interval konversi (NIK) sebesar 88,31 - 100,00; dan mutu pelayanan (x) A. Target IKM adalah target indeks kepuasan masyarakat yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan

Indikator Sasaran V : IKM Pelayanan Kesehatan Rujukan

1. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau subspesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus, Rumah sakit adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan. Pengukuran IKM pada FKRTL menggunakan

metode survei yang sama dengan pengukuran IKM pada FKTP dan tetap mengacu pada Permenpan-RB no 14/2017. Target IKM ditetapkan oleh Kepala dinas sebagai pimpinan OPD atas dasar usulan Direktur Rumah Sakit Sebagai Pimpinan UPTD.

Indikator Sasaran VI : Tingkat prevalensi Tuberkulosis

1. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. *Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis*

Target pemenuhan capaian Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Yaitu 100%. Sasaran orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar diperoleh dari data *real* Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Tahun Sebelumnya. Formula yang digunakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 adalah sebagai berikut : Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama. X 100 %.

Indikator Sasaran VII : Persentasi penurunan penderita penyakit tidak menular Hipertensi

1. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. *Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi*

Target pemenuhan capaian Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Yaitu 100%. Sasaran penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar diperoleh dari data *real* Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Tahun Sebelumnya. Formula yang digunakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 adalah sebagai berikut : Jumlah

penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama X 100 %.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau merupakan atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Indikator kinerja Dinkes Kota Kotamobagu yang merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, dapat dilihat pada tabel 7.1 dibawah ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2023

Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		
			2021	2022	2023
			Target	Target	Target
Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	302,48	296,43	290,50	284,69
Angka Kematian Bayi	Per 1000 Kelahiran Hidup	1,81	7,80	7,64	7,49
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	5,09	4,89	4,69	4,51
IKM Pelayanan Kesehatan Dasar	Indeks Konversi	-	Baik	Baik	Baik
IKM Pelayanan Kesehatan Rujukan	Indeks Konversi	-	Baik	Baik	Baik
Tingkat prevalensi Tuberkulosis	Per 100.000 Penduduk	200,00	190,00	180,50	171,48
Persentasi penurunan penderita penyakit tidak menular Hipertensi	%	7,34	6,97	6,62	6,29

Berdasarkan Tabel 7.1 dasar penentuan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021–2023 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sesuai dengan penjelasan sebagai berikut :

I. Indikator Sasaran I : Angka kematian ibu.

Kondisi Kinerja diambil dari target capaian kegiatan melalui 1 (Satu) kegiatan dan 2 (Dua) Sub Kegiatan yang menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan dengan target capaian kegiatan yaitu :

- Target Tahun 2021

- a. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target capaian Jumlah puskesmas dengan IKM minimal Baik (Unit).

- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Indikator yang diukur yaitu Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan target **100 %**.

- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Indikator yang diukur yaitu Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan dengan target **100 %**.

II. Indikator Sasaran II : Angka Kematian Bayi.

Kondisi Kinerja diambil dari target capaian kegiatan melalui 1 (Satu) kegiatan dan 1 (Satu) Sub Kegiatan yang menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan dengan target capaian kegiatan yaitu :

- Target Tahun 2021

- a. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target capaian Jumlah puskesmas dengan IKM minimal Baik (Unit).

- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Indikator yang diukur yaitu Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan target **100 %**.

III. Indikator Sasaran III : Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita

Kondisi Kinerja diambil dari target capaian kegiatan melalui 1 (Satu) kegiatan dan 2 (Dua) Sub Kegiatan yang menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan dengan target capaian kegiatan yaitu :

- Target Tahun 2021

- a. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target capaian Jumlah puskesmas dengan IKM minimal Baik (Unit).

- Sub Kegiatan *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita*, Indikator yang diukur yaitu Cakupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar dengan target **100 %**.
- Sub Kegiatan *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*, Indikator yang diukur yaitu Jumlah Penurunan angka penderita Stunting (orang) dengan target **100 %**.

IV.Indikator Sasaran IV : IKM Pelayanan Kesehatan Dasar

Kondisi Kinerja diambil dari target capaian kegiatan melalui 1 (Satu) kegiatan yang menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan dengan target capaian kegiatan yaitu :

- Target Tahun 2021

- a. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target capaian Jumlah puskesmas dengan IKM minimal **Baik** (Unit).

V.Indikator Sasaran V : IKM Pelayanan Kesehatan Rujukan

Kondisi Kinerja diambil dari target capaian kegiatan melalui 1 (Satu) dengan target capaian kegiatan yaitu :

- Target Tahun 2021

- a. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target capaian Jumlah Rumah Sakit dengan IKM minimal **Baik** (Unit).

VI.Indikator Sasaran VI : Tingkat prevalensi Tuberkolosis.

Kondisi Kinerja diambil dari target capaian kegiatan melalui 1 (Satu) kegiatan dan 1 (Satu) Sub Kegiatan yang menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan dengan target capaian kegiatan yaitu :

- Target Tahun 2021

- a. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target capaian Jumlah puskesmas dengan IKM minimal Baik (Unit).

- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, Indikator yang diukur yaitu Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar dengan target **100 %**.

VII.Indikator Sasaran VII : Persentasi penurunan penderita penyakit tidak menular Hipertensi.

Kondisi Kinerja diambil dari target capaian kegiatan melalui 1 (Satu) kegiatan dan 1 (Satu) Sub Kegiatan yang menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan dengan target capaian kegiatan yaitu :

- Target Tahun 2021

- a. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target capaian Jumlah puskesmas dengan IKM minimal Baik (Unit).

- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Indikator yang diukur yaitu Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan target **100 %**.

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinkes Kota Kotamobagu merupakan suatu dokumen perencanaan yang mengacu pada Perubahan RPJMD Tahun 2021-2023. Dokumen Perubahan Renstra ini merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinkes Kota Kotamobagu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja pelayanan, Isu isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam waktu 3 (Tiga) tahun mendatang.

Perubahan Renstra Dinkes Kota Kotamobagu diharapkan dapat menjadi komitmen dan kesatuan dalam menentukan arah dan peran Dinkes Kota Kotamobagu dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Kotamobagu sebagaimana diamanatkan dalam Perubahan RPJMD Tahun 2021 – 2023 Kota Kotamobagu. Selanjutnya dokumen Renstra ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Dinkes Kota Kotamobagu setiap tahunnya.

Akhir kata kiranya keberhasilan Renstra ini dapat diwujudkan dengan adanya kesepahaman yang sama dalam mengimplementasikannya untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Kotamobagu, 7 Februari 2022
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA KOTAMOBAGU



dr. TANTY KOROMPOT, MM.Kes

NIP. 19720102 200701 2 019